BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PALEMBANG

Jl. Pangeran Ratu Seberang Ulu I Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan
Telp. (0711) 510126, Faksimile. (0711) 510195
Email : bpom_palembang@pom.go.id, Website : www.pom.go.id

PEMBERITAHUAN
NOMOR: PR.04.02.16B.05.26.03
TENTANG
PENYESUAIAN NOMENKLATUR SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PADA DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2025-2029

Dalam rangka menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan implementasi prinsip akuntabilitas kinerja, bersama ini disampaikan bahwa terdapat beberapa nomenklatur Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja pada Dokumen Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2025-2029 yang memerlukan penyesuaian agar selaras dengan nomenklatur pada dokumen perencanaan kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan RI.

Adapun penyesuaian nomenklatur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Nomenklatur Semula	Nomenklatur Menjadi
Sasaran Kegiatan	
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah Kerja Balai Besar POM di Palembang	Meningkatnya efektivitas KIE
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang yang prima	Layanan Publik UPT yang Prima
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Palembang yang optimal	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indikator Kinerja	
Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di wilayah UPT
Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Besar POM di Palembang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Palembang	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai besar POM di Palembang	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang	Indeks Pelayanan Publik UPT
Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Palembang	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang	Nilai AKIP UPT BPOM
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Palembang	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Penyesuaian tersebut tidak mengubah substansi Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, target, maupun arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Balai Besar POM di Palembang Tahun 2025-2029, melainkan dilakukan untuk menjaga keselarasan dokumen perencanaan, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Penyesuaian formal pada Dokumen Rencana Strategis akan dilaksanakan sesuai mekanisme reviu Renstra Unit Organisasi dan Satker yang berlaku di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pemberitahuan ini disampaikan sebagai bentuk transparansi informasi publik serta komitmen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang dalam peningkatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan informasi bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Palembang, 08 Mei 2026
Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Palembang,



Yani Ardiyanti, SF, Apt., M.Sc

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PALEMBANG
Jl. Pangeran Ratu Seberang Ulu I Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan
Telp. (0711) 510126, Faksimile. (0711) 510195
Email : bpom_palembang@pom.go.id, Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PALEMBANG
NOMOR HK.02.02.5A.12.25.493 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PALEMBANG TAHUN 2025-2029

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Palembang tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI PALEMBANG TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR POM DI PALEMBANG TAHUN 2025-2029.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Besar POM di Palembang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Besar POM di Palembang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Renstra Balai Besar POM POM di Palembang memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Palembang untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketiga : Renstra Balai Besar POM di Palembang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:

a. acuan bagi Balai Besar POM di Palembang dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Besar POM di Palembang.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal : 05 Desember 2025
Kepala Balai Besar POM di Palembang



YANI ARDIYANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN POM

Rencana Strategis
Balai Besar POM di Palembang
2025 - 2029





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

BAB I . PENDAHULUAN 1
1.1 Kondisi Umum 2
1.2 Potensi dan Permasalahan 26

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN 51
2.1 Visi 52
2.2 Misi 53
2.3 Tujuan BBPOM di Palembang 55
2.4 Sasaran Kegiatan BBPOM di Palembang 57

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 77
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 78
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BBPOM di Palembang 82

BAB IV. PENUTUP 93

LAMPIRAN
LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang (BBPOM di Palembang) merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut UPT BPOM adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai dengan bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. BBPOM di Palembang turut mendukung langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat, khususnya di wilayah Sumatera Selatan.

Tugas dan fungsi UPT BPOM diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut Balai Besar POM di Palembang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, BBPOM di Palembang menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap

pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Selain fungsi tersebut, BBPOM di Palembang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis BPOM juga turut serta melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing sebagaimana tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

BBPOM di Palembang dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi di atas pada 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.



Gambar 1.1. Wilayah Kerja BBPOM di Palembang

Wilayah kerja tersebut terdiri dari 173 (seratus tujuh puluh tiga) kecamatan dengan penyebaran sebagai berikut :

Tabel 1.1. Kecamatan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang

I. KOTA		Ibukota	Jumlah Kecamatan
1.	Palembang	Palembang	18
2.	Prabumulih	Prabumulih	6

II. KABUPATEN		Ibukota	Jumlah Kecamatan
1.	Ogan Ilir	Indralaya	16
2.	Ogan Komering Ilir	Kayu Agung	18
3.	Ogan Komering Ulu	Baturaja	13
4.	OKU Selatan	Muara Dua	19
5.	OKU Timur	Martapura	20
6.	Muara Enim	Muara Enim	22
7.	Musi Banyu Asin	Sekayu	15
8.	Banyu Asin	Pangkalan Balai	21
9.	Penukal Abab Pematang Ilir	Talang Ubi	5

(sumber data: Keputusan Kepala BPS No. 646 Tahun 2024 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik tanggal 24 September 2024)

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka BBPOM di Palembang telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.



Gambar 1.2. Struktur Organisasi BBPOM di Palembang

Berdasarkan hal tersebut, maka hanya ada 2 pejabat struktural yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama (Kepala BBPOM di Palembang) dan pejabat administrator (Kepala Bagian Tata Usaha). Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan

pejabat fungsional.

BBPOM di Palembang, sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya, menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan untuk lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini didasarkan pada hasil evaluasi terhadap capaian kinerja BBPOM di Palembang pada periode 2020–2024, serta mempertimbangkan masukan dan arahan dari Badan POM. Melalui Renstra ini, diharapkan kinerja dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan yang dihadapi ke depan.

1.1.1.Capaian Kinerja Balai Besar POM di Palembang Tahun 2020-2024

Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025–2029, capaian kinerja BBPOM di Palembang pada periode 2020–2024 perlu ditinjau secara menyeluruh. Evaluasi ini mencerminkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan, serta menjadi pijakan penting dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi ke depan. Selaras dengan sasaran dan indikator agenda pembangunan nasional, capaian kinerja BBPOM di Palembang juga mengacu pada indikator dalam RPJMN, yaitu: (1) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat, dan (2) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, yang diukur berdasarkan alat ukur atau *tools* pengawasan yang digunakan oleh BBPOM di Palembang.

Tabel 1.1.1. Realisasi Indikator RPJMN Terkait Balai Besar POM di Palembang Tahun 2020-2024

Uraian	T/R	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Obat Memenuhi Syarat	T	80,8	91	91,5	92	93
	R	91,19	94,5	82,86	92,31	95,44
	%	112,86	103,85	90,56	100,34	102,62
Persentase Makanan Memenuhi Syarat	T	78	86,5	88	89,5	91
	R	86,52	90,22	77,43	89,55	90,58
	%	110,92	104,30	87,99	100,06	99,54

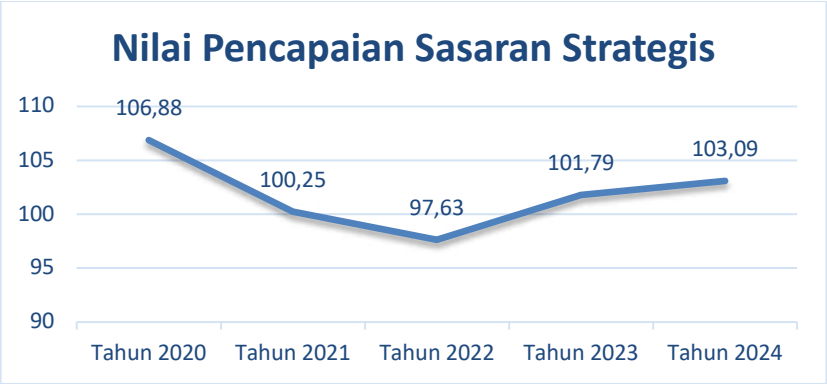
Capaian Indikator Persentase Obat Memenuhi Syarat dari tahun 2020 hingga 2024 berfluktuasi, dimana terdapat penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2022. Hal ini karena banyaknya jumlah sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap pemeriksaan (TIE/ilegal/palsu, rusak, kedaluwarsa, TMK label/penandaan). Kondisi ini terjadi karena metode sampling acak yang digunakan Balai Besar POM di Palembang menggambarkan kondisi kualitas Obat beredar di masyarakat, sehingga probabilitas hasil pemeriksaan dan pengujian sampel TMS menjadi tinggi. Namun demikian, pada tahun 2023

dan 2024 capaian kembali stabil melewati target. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan telah tepat sasaran. Indikator Persentasi Makanan Memenuhi Syarat capaiannya cukup fluktuatif dan menurun drastis pada tahun 2022 dan kembali tidak mencapai target di tahun 2024. Hal ini karena meningkatnya jumlah sampel makanan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terutama dengan sampel TMS Uji Laboratorium. Namun demikian, hal ini juga menunjukkan pengambilan sampel oleh Balai Besar POM di Palembang secara acak mampu menjaring produk-produk yang TMS (palsu, rusak, kedaluwarsa dan lain-lain).

Beberapa upaya untuk meningkatkan capaian kinerja, antara lain: a) Melakukan pengambilan sampel sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga pengujian dan pelaporannya tepat waktu; b) Meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan yang berlaku; c) Meningkatkan koordinasi dengan Pusdatin dan Balai Penguji terkait hasil pengujian yang harus segera dilaporkan melalui SIPT setelah sampel selesai uji konfirmasi.

Selain mengacu pada indikator dalam RPJMN, penilaian kinerja BBPOM di Palembang juga dilakukan secara menyeluruh melalui pengukuran Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). Pengukuran ini bertujuan untuk menilai keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi. NPSS mencerminkan nilai kinerja organisasi secara komprehensif yang merupakan hasil konsolidasi dari seluruh indikator kinerja dalam peta strategi. Nilai ini menjadi dasar penetapan predikat kinerja organisasi serta menjadi acuan dalam penentuan distribusi predikat kinerja individu pegawai.

Pada periode 2020–2024, nilai NPSS BBPOM di Palembang menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 2022, nilai NPSS tercatat sebesar 97,63 dengan predikat “Baik” tapi turun dari penilaiannya tahun sebelumnya. Namun demikian, BBPOM di Palembang berhasil kembali meraih predikat tertinggi “Istimewa” pada tahun 2023 dengan nilai 101,79, dan meningkat lebih lanjut menjadi 103,09 pada tahun 2024.



Gambar 1.1.1 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis BBPOM di Palembang Tahun 2020 - 2024

Pengukuran kinerja BBPOM di Palembang mengacu pada Sasaran Strategis yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam penyusunan sasaran strategis 2020-2024, BPOM menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu s*takeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. BBPOM di Palembang sebagai salah satu UPT BPOM sesuai dengan Peta Strategis UPT memiliki 11 Sasaran Kegiatan (SK) dan hingga 2024 dengan 34 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 1.1.2. Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan BBPOM di Palembang
Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan			2020			2021			2022			2023			2024		
			T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK	**1**	**Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palembang**															
IKSK	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	91,19	112,86	91	94,5	103,85	91,5	82,86	90,56	92	92,31	100,34	93	95,44	102,62
IKSK	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	86,52	110,92	86,5	90,22	104,3	88	77,43	87,99	89,5	89,55	100,06	91	90,58	99,54
IKSK	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95	95,09	100,09	95	95,1	100,11	96	82,21	85,64	96,5	92,95	96,32	97	96,04	99,01
IKSK	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75	79,66	106,21	80	85,42	106,78	82	83,72	102,1	83	87,04	104,87	87,9	82,74	94,13
IKSK	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat (2021-2024)				91	60	65,93	91	77,43	85,09	93	81,05	87,15	93	93,07	100,08
SK	**2**	**Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang**															
IKSK	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	72	78,14	108,53	81	76,47	94,41	84	82,53	98,25	86	84,55	98,31	89	87,13	97,9
SK	**3**	**Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang**															
IKSK	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86	87,67	101,94	87	81,81	94,03	89	96,02	107,89	91	98,34	108,07	99	98,85	99,85
IKSK	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	71	74,27	104,61	75,68	71,83	94,91	77,12	77,2	100,1	78,57	79,74	101,49	80,01	80,6	100,74
IKSK	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89,5	91,74	102,5	91,75	92,21	100,5	92	90,93	98,84	92,5	94,45	102,11	95	95,9	100,95
SK	**4**	**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palembang**															
IKSK	10	Persentase keputusan/rekomendasi	87	98,87	113,64	99,1	99	99,9	99,5	89,09	89,54	100	100	100	100	100	100

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan			2020			2021			2022			2023			2024		
			T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
		hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan															
IKSK	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	63,76	115,93	60	64,29	107,15	65	41,09	63,22	70	78,66	112,37	75	78,16	104,21
IKSK	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	100	117,65	100	99,84	99,84	100	100	100	100	99,78	99,78	100	100	100
IKSK	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	20,62	41,24	55	55,56	101,02	60	48,84	81,4	60	61,74	102,9	65	65,79	101,22
IKSK	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	61,8	103	63	73,01	115,89	66	72,86	110,39	68	77,61	114,13	78,1	85,33	109,26
IKSK	15	Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	3,51	3,8	108,26	3,99	4,27	107,02	4,2	4,14	98,57	4,25	4,68	110,12	4,75	4,78	100,63
IKSK	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik (2022-2024)							77	90	116,88	79	80,16	101,47	100	100	100
IKSK	17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota (2024)													95	100	105,26
SK	**5**	**Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang**															
IKSK	18	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,69	93,79	103,42	94	96,6	102,77	95,4	95,7	100,31	96,8	98,04	101,28	98,9	98,99	100,09
IKSK	19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	16	100	40	40	100	59	59	100	77	77	100	97	97	100
IKSK	20	Jumlah desa pangan aman	4	4	100	12	12	100	19	19	100	25	25	100	32	32	100

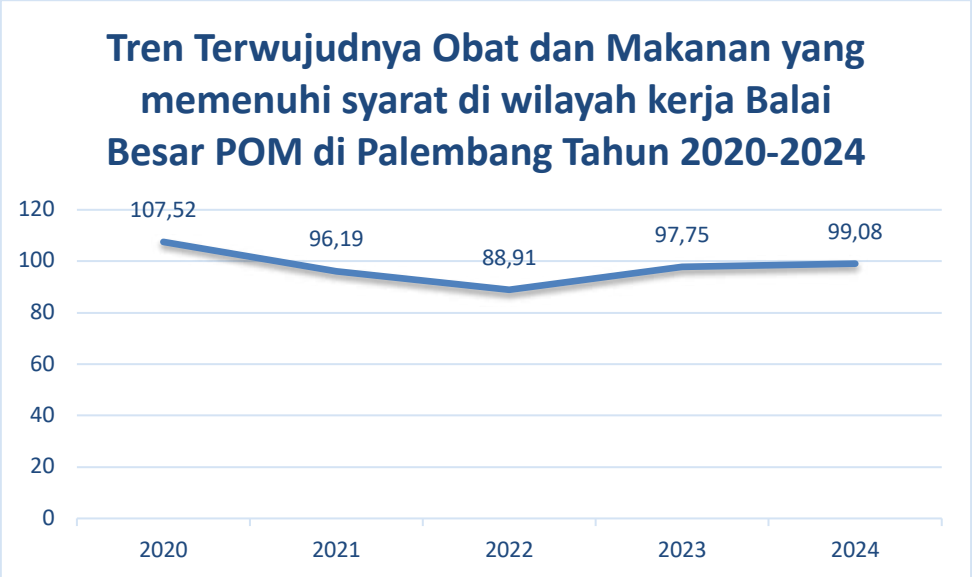
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan			2020			2021			2022			2023			2024		
			T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSK	21	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (2020)	2	2	100												
IKSK	22	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (2021-2024)				6	6	100	9	9	100	13	13	100	17	17	100
SK	**6**	**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang**															
IKSK	23	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	95,88	112,8	100	98,38	98,38	100	98,28	98,28	100	99,34	99,34	100	100	100
IKSK	24	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	98,81	131,75	100	99,38	99,38	100	93,31	93,31	100	98,95	98,95	100	100	100
SK	**7**	**Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang**															
IKSK	25	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	52	56,74	109,12	58	69,03	119,02	64	64,17	100,27	69	70,44	102,09	75	68,73	91,64
SK	**8**	**Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Palembang yang optimal**															
IKSK	26	Indeks RB UPT	85	81,72	96,14	82,9	82,94	100,05	83,9	80,43	95,86	84,9	82,57	97,26	85,9	84,85	98,78
IKSK	27	Nilai AKIP UPT	81	78,87	97,37	79,9	77,59	97,11	80,9	79,57	98,36	81,9	79,43	96,98	82,81	80,55	97,27
IKSK	28	Nilai Pengelolaan Kearsipan (2024)													94,71	95,66	101
SK	**9**	**Terwujudnya SDM BBPOM di Palembang yang berkinerja optimal**															
IKSK	29	Indeks Profesionalitas ASN UPT	75	85,29	113,72	84,5	84,24	99,69	84,75	85,47	100,85	85	90,42	106,38	90,77	87,75	96,67
SK	**10**	**Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan**															
IKSK	30	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	70	70,5	100,71	77	76,2	98,96	82	80,58	98,27	87	86,1	98,97	86,3	87,49	101,38
IKSK	31	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1,51	2,5	165,56	2	1,95	97,5	2,25	2,5	111,11	2,5	3	120	3	3	100
SK	**11**	**Terkelolanya Keuangan BBPOM di Palembang secara Akuntabel**															
IKSK	32	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93	97,39	104,72	98,6	89,94	91,22	98,7	90,58	91,77	98,7	89,52	90,7	90,21	91,3	101,21
IKSK	33	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT (2020-2021)	90	100	111,11	92	100	108,7									
IKSK	34	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (2024)													94,35	100	105,99
IKSK	35	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (2024)													93	97,82	105,18

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan			2020			2021			2022			2023			2024		
			T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSK	36	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri (2024)													60	79,3	132,17

Penjelasan terkait capaian kinerja pada setiap sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 (SK1)
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Palembang

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari Standardisasi, Penilaian (*pre-market evaluation*), Pengawasan selama beredar (*post-market control*), Pengujian Laboratorium, dan Penegakan Hukum. Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut:
(1) Persentase Obat yang memenuhi syarat; (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat; (3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; dan (5) Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat.



Gambar 1.1.2 Tren Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat BBPOM di Palembang Tahun 2020-2024

Selama periode 2020–2024, capaian indikator menunjukkan kinerja yang relatif stabil. Secara agregat, capaian SK pada awal periode (2020) mencapai 107,52%, menandakan pelaksanaan program berjalan optimal. Penurunan sempat terjadi hingga titik terendah di tahun 2022 (90,28%), yang diduga dipengaruhi oleh kendala eksternal maupun penyesuaian sistem pengawasan. Namun, pemulihan kinerja berhasil dilakukan pada dua tahun berikutnya, ditunjukkan dengan capaian 97,75% di tahun 2023 dan meningkat menjadi 99,08% pada tahun 2024.

Kinerja indikator Persentase Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat konsisten berada pada kisaran capaian tinggi (>99%) di akhir periode. Sementara itu, indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat yang mulai sejak 2021, menunjukkan peningkatan signifikan dari 65,93% di awal menjadi 100,08% pada 2024.

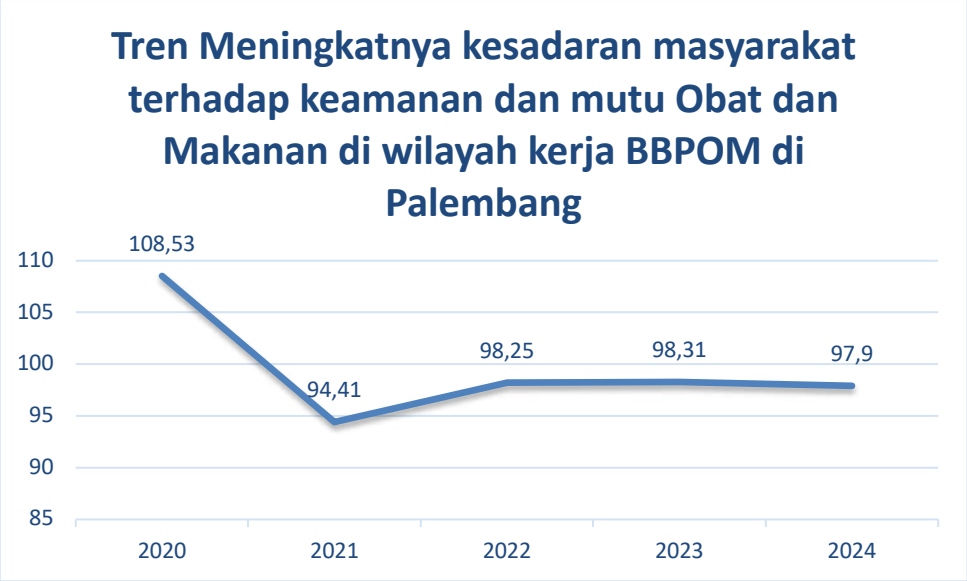
Secara keseluruhan, Sasaran Kegiatan 1 berhasil dicapai dengan kinerja yang terkendali dan menunjukkan peningkatan kualitas pelaksanaan program, terutama dalam penguatan pengawasan mutu produk dan efektivitas tindak lanjut terhadap hasil pengawasan.

Beberapa upaya yang dilakukan BBPOM di Palembang yaitu: a) meningkatkan koordinasi dengan Pusdatin dan Balai Penguji terkait hasil pengujian yang harus segera dilaporkan melalui SIPT setelah sampel selesai uji konfirmasi; b) meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan; c) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas melalui kampanye Cek KLIK pada kegiatan KIE untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan; d) meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan.

2. Sasaran Kegiatan 2 (SK2)

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Masyarakat juga diharapkan berperan dalam pengawasan, sehingga perlu ditingkatkan pengetahuannya tentang Obat dan Makanan yang berkualitas.



Gambar 1.1.3. Tren Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan BBPOM di Palembang Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui satu indikator utama, yaitu Indeks Kesadaran Masyarakat *(Awareness Index)* terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja UPT. Selama periode 2020–2024, indikator ini menunjukkan kinerja yang stabil dan berada dalam kategori baik hingga sangat baik.

Capaian awal pada tahun 2020 sebesar 108,53% meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 (94,41%), capaian kembali meningkat dan konsisten pada tahun-tahun berikutnya, dengan nilai antara 97,9% hingga 98,31% pada periode 2022–2024.

Stabilitas capaian ini mencerminkan keberhasilan BBPOM di Palembang dalam mempertahankan tingkat kesadaran publik melalui strategi penyampaian informasi yang adaptif serta peningkatan jangkauan edukasi kepada kelompok masyarakat sasaran. Kinerja ini juga mencerminkan adanya kontinuitas dalam pelaksanaan kegiatan yang berbasis pada pendekatan risiko dan penguatan peran masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan Obat dan Makanan.

Secara keseluruhan, Sasaran Kegiatan 2 dapat dinyatakan tercapai dengan baik, serta menjadi indikator penting atas keberlanjutan fungsi edukatif dan promotif yang dijalankan oleh BBPOM di Palembang.

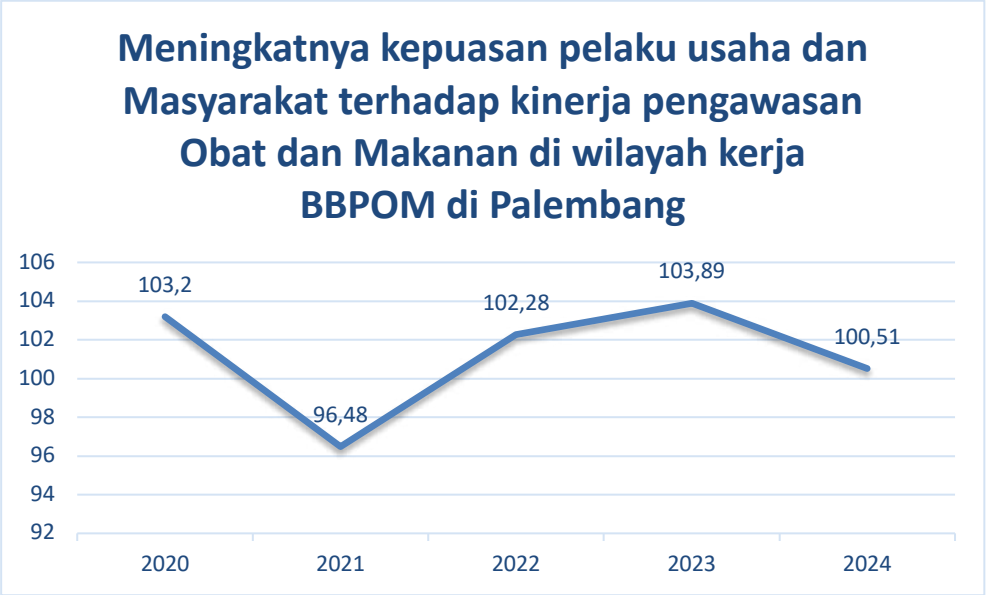
Beberapa upaya yang dilakukan BBPOM di Palembang yaitu: a) meningkatkan sinergi dan penguatan kemitraan dengan lintas sektor untuk berkolaborasi dan bekerjasama mengedukasi masyarakat dan menyebarluaskan informasi keamanan Obat dan Makanan; b) meningkatkan intensitas dan strategi pelaksanaan program KIE kepada masyarakat agar dapat memastikan bahwa informasi dan pengetahuan terkait keamanan obat dan makanan dapat dipahami sepenuhnya oleh masyarakat hingga dapat merubah perilaku masyarakat.

3. Sasaran Kegiatan 3 (SK3)

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang

BBPOM di Palembang berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik mencakup berbagai hal yang terkait dengan pengawasan rangka fungsi dalam perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan 3 Indikator Kinerja sebagai berikut: (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan; (2) Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan;

dan (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar POM di Palembang.



Gambar 1.1.4 Tren Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Palembang Tahun 2020-2024

Rata-rata capaian SK dalam lima tahun berada dalam kisaran 96–103%, dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 (103,89%) dan capaian terendah pada 2021 (96,48%). Indikator kepuasan pelaku usaha menunjukkan tren meningkat dari 94,03% (2021) menjadi 99,85% (2024), menandakan perbaikan signifikan dalam efektivitas pembinaan dan komunikasi regulatif.
Indikator kepuasan masyarakat terhadap pengawasan juga menunjukkan capaian stabil di atas 100% pada tiga tahun terakhir, yang mencerminkan persepsi publik yang positif terhadap transparansi dan responsifitas BBPOM di Palembang. Demikian pula dengan kepuasan terhadap layanan publik, yang secara konsisten berada dalam kategori sangat baik, dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 (102,11%).
Capaian indikator-indikator ini menunjukkan keberhasilan BBPOM di Palembang dalam mempertahankan kualitas layanan publik dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan. Hal ini menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta reputasi kelembagaan di mata publik.
Beberapa upaya yang dilakukan BBPOM di Palembang yaitu: a) Menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kualitas bimbingan dan pembinaan BBPOM di Palembang; b) meningkatkan kegiatan *public relation* dan publikasi berbagai aktivitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Palembang melalui berbagai media; c) Meningkatkan *engagement* dengan melakukan interaksi aktif

dengan pengikut pada media sosial; d) melakukan sosialisasi tentang layanan, mengoptimalkan berbagai media untuk konsultasi, dan memberikan pendampingan kepada pelanggan; e) memperhatikan saran/masukan dari masyarakat serta menyusun rencana tindak lanjutnya.

4. Sasaran Kegiatan 4 (SK4)

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Sasaran Kegiatan ini diukur dengan 8 indikator : (1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan; (2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan; (3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu; (4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; (5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; (6) Indeks Pelayanan Publik UPT; dan (7) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik; (8) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.



Gambar 1.1.5. Tren Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang Tahun 2020-2024

Selama periode 2020–2024, kinerja indikator menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dan sebagian besar mencapai target yang ditetapkan.

IKSK 10 (Keputusan hasil inspeksi yang dilaksanakan) dan IKSK 12 (Sertifikasi tepat waktu) menunjukkan konsistensi capaian sangat tinggi (mendekati atau mencapai 100%) sepanjang periode. IKSK 11 sempat mengalami penurunan capaian pada 2022 (63,22%) namun berhasil meningkat signifikan pada tahun-tahun berikutnya, mencerminkan perbaikan dalam efektivitas advokasi terhadap pemangku kepentingan.

IKSK 13 dan 14 yang menilai kepatuhan sarana produksi dan distribusi menunjukkan peningkatan nyata dari tahun ke tahun, di mana IKSK 13 naik dari 41,24% (2020) menjadi 101,22% (2024), sedangkan IKSK 14 konsisten meningkat hingga 109,26% pada 2024.

Sementara itu, IKSK 15 (Indeks Pelayanan Publik) tetap dalam kategori sangat baik sepanjang periode, mencerminkan kualitas layanan yang terus ditingkatkan. Dua indikator baru yaitu IKSK 16 (UMKM memenuhi standar) dan IKSK 17 (keterlibatan dalam program lintas sektor) mulai diukur pada 2022 dan 2024, keduanya langsung mencatat capaian maksimal bahkan melebihi target, menunjukkan efektivitas implementasi program baru yang strategis.

5. Sasaran Kegiatan 5 (SK5)

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang

Komunikasi, informasi dan edukasi tentang obat dan makanan diharapkan dapat membekali pengetahuan kepada masyarakat tentang produk obat, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, dan pangan yang aman untuk dikonsumsi. Dengan peningkatan efektifitas komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dapat mengunggah komunitas desa, pasar dan komunitas sekolah supaya berdaya, berpartisipasi dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di komunitasnya masing-masing. Capaian sasaran kegiatan hingga 2024 diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut (1) Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan; (2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman; (3) Jumlah desa pangan aman; (4) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.



Gambar 1.1.6 Tren Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan BBPOM di Palembang Tahun 2020-2024

IKSK 18 (Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan) menunjukkan performa yang sangat stabil dan tinggi selama lima tahun. Capaian indikator ini secara konsisten berada di atas 100% setiap tahun, yang mencerminkan bahwa strategi komunikasi BBPOM di Palembang berhasil menjangkau dan memberi dampak positif kepada masyarakat Sumatera Selatan.

Sementara itu, IKSK 19 (Jumlah sekolah dengan PJAS Aman), IKSK 20 (Jumlah desa pangan aman), dan IKSK 22 (Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas) merupakan indikator bersifat kumulatif, sehingga capaian tahun berjalan merupakan hasil akumulasi dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Indikator-indikator ini menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten. Contohnya:

- Sekolah PJAS Aman bertambah dari 16 sekolah (2020) menjadi 97 sekolah (2024),
- Desa pangan aman meningkat dari 4 desa (2020) menjadi 32 desa (2024),
- Pasar pangan berbasis komunitas bertambah dari 6 pasar (2021) menjadi 17 pasar (2024).

Setiap tahun, capaian indikator-indikator ini mencapai 100% dari target tahunan, mencerminkan keberhasilan dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang bertahap dan terukur.

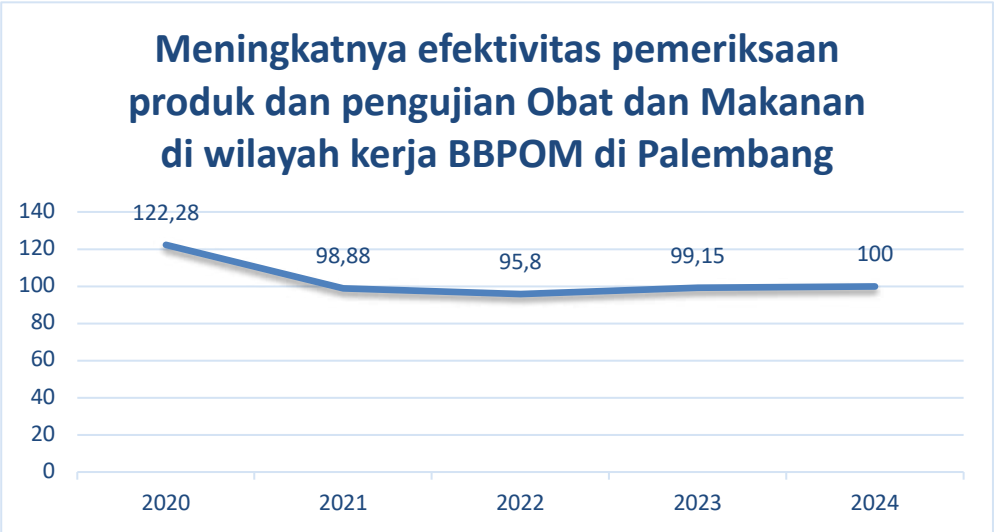
IKSK 21 (Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya) hanya ditetapkan di tahun 2020 dengan capaian 100%, dan pada tahun-tahun berikutnya tidak dilanjutkan sebagai indikator tersendiri, karena diintegrasikan ke pendekatan berbasis komunitas (IKSK 22).

6. Sasaran Kegiatan 6 (SK 6)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang

Untuk melihat konsistensi mutu produk, dilakukan pengawasan melalui

pemeriksaaan yang meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan dan penandaan label yang dilanjutkan dengan pengujian laboratorium secara kimia, biologi, dan mikrobiologi terhadap produk yang disampling oleh BBPOM di Palembang. Pengujian produk secara laboratorium dilakukan menggunakan metode analisis terkini mengacu pada standar nasional dan internasional. Jenis produk berkembang sangat pesat, sehingga tidak semua metode analisis yang dibutuhkan telah tersedia pada buku standar tersebut atau tidak semua metode analisis pada buku standar dapat digunakan dalam pengujian produk. Dalam mengawal mutu dan keamanan produk perlu dikembangkan metode analisis yang disesuaikan dengan profil dan matriks sampel. Dalam validasi metode analisis dan pengujian diperlukan baku pembanding sebagai penentu validitas metode dan hasil pengujian, sedangkan di pasaran tidak selalu tersedia baku pembanding yang dibutuhkan. Semua sampel yang berasal dari sampel prioritas sampling dan sampel dari pihak ke-3 juga dituntut untuk diselesaikan tepat waktu. Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan 2 indikator kinerja yaitu: (1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar; dan (2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.



Gambar 1.1.7. Tren Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan BBPOM di Palembang Tahun 2020-2024

Selama periode 2020–2024, capaian kedua indikator ini menunjukkan konsistensi yang sangat baik. Kinerja pada awal periode (2020) bahkan melampaui target secara signifikan, dengan capaian:

- 112,8% untuk sampel obat
- 131,75% untuk sampel makanan

Meskipun pada tahun-tahun berikutnya terjadi sedikit fluktuasi, terutama di tahun 2022, capaian tetap berada di atas ambang minimum standar (≥ 93%). Pada tahun 2023 dan 2024, BBPOM di Palembang berhasil menstabilkan capaian hingga mencapai 99–100%, menunjukkan bahwa efektivitas kegiatan

pemeriksaan dan pengujian produk semakin optimal dan andal. Secara keseluruhan, Sasaran Kegiatan 6 berhasil terpenuhi dengan sangat baik selama lima tahun terakhir, dan menunjukkan adanya penguatan kapasitas laboratorium serta sistem pengawasan mutu produk secara berkelanjutan.

7. Sasaran Kegiatan 7 (SK7)

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, digunakan indikator (1) Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.



Gambar 1.1.8. Tren Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan BBPOM di Palembang Tahun 2020-2024

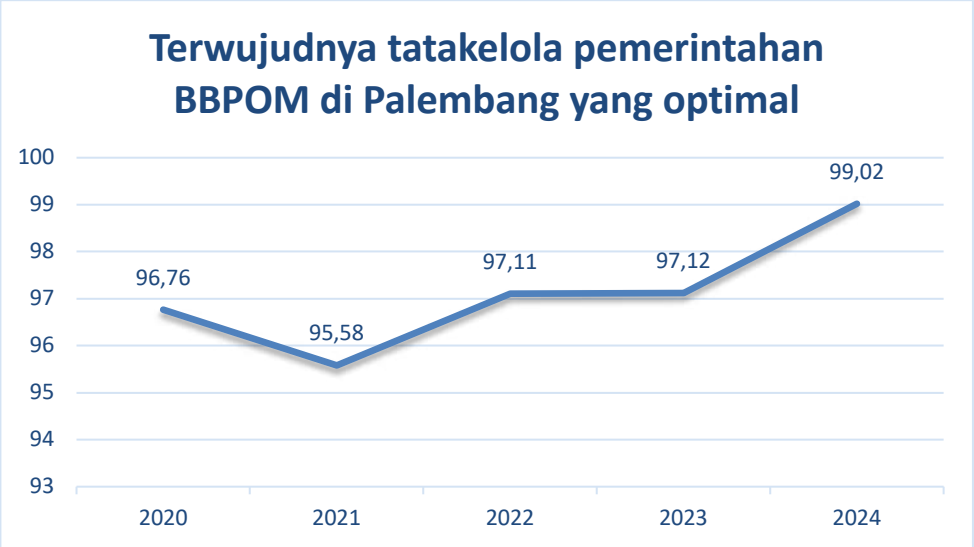
Beberapa tantangan dalam pencapaian SK7 yaitu: a) meningkatkan

koordinasi dengan Korwas PPNS untuk pelaku yang tidak kooperatif; b) Segera melaksanakan petunjuk JPU jika P19 sudah terbit.

8. Sasaran Kegiatan 8 (SK8)

Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Palembang yang optimal

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sasaran kegiatan ini diukur dengan menggunakan indikator: (1) Nilai RB BPOM; (2) Nilai AKIP BPOM; (3) Nilai Pengelolaan Kearsipan.



Gambar 1.1.9. Tren Tatakelola Pemerintahan BBPOM di Palembang yang optimal Tahun 2020-2024

Selama lima tahun terakhir, pelaksanaan tata kelola pemerintahan di BBPOM Palembang menunjukkan konsistensi yang tinggi dan progresif dalam aspek reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, serta pengelolaan arsip.

- Indeks RB UPT (IKSK 26) menunjukkan capaian yang baik dengan rata-rata 97,62%, menandakan komitmen terhadap reformasi birokrasi secara konsisten.
- Nilai AKIP UPT (IKSK 27) juga terjaga baik dengan rata-rata capaian 97,42%, memperlihatkan konsistensi akuntabilitas kinerja dan pengelolaan program.
- Nilai Pengelolaan Kearsipan (IKSK 28) yang diukur pada tahun 2024 berhasil melampaui target (101%), mencerminkan kemampuan BBPOM Palembang dalam memenuhi standar pengelolaan arsip nasional dengan baik sejak pertama kali dinilai.

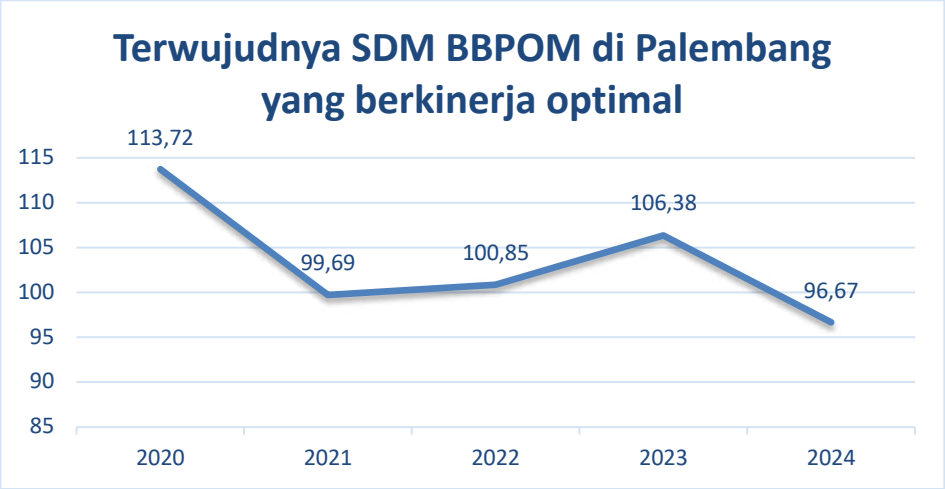
Secara keseluruhan, SK 8 telah berjalan efektif dan sesuai arah kebijakan tata kelola pemerintahan, dengan nilai capaian yang mendekati sempurna di seluruh indikatornya, serta menunjukkan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dan prinsip *good governance*.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian SK8 yaitu: a) memastikan Rencana Aksi RB relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama; b) menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP sebagaimana tercantum pada LHE SAKIP; c) monev Rencana Aksi pengelolaan pengaduan dan melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan pengaduan kepada masyarakat; d) memastikan rencana aksi RB Tematik telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah; e) adanya dukungan eksternal berupa dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas sumber daya meliputi 5 M (*man, material, money, method and machine).*

9. Sasaran Kegiatan 9 (SK9)

Terwujudnya SDM BBPOM di Palembang yang berkinerja optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Untuk mengukur sasaran kegiatan ini digunakan satu indikator yaitu: (1) Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Palembang.



Gambar 1.1.10. Tren SDM BBPOM di Palembang yang berkinerja optimal Tahun 2020-2024

Selama periode 2020–2024, capaian Indeks Profesionalitas ASN UPT menunjukkan tren fluktuatif dengan rata-rata capaian sebesar 103,46%, menandakan secara umum target telah terlampaui. Pada tahun 2020, capaian mencapai 113,72%, menandakan dorongan awal yang kuat terhadap pengembangan SDM, terutama dalam meningkatkan kompetensi dan kedisiplinan ASN.

Memasuki tahun 2021, capaian sedikit menurun menjadi 99,69%, hampir mencapai target namun mengalami deviasi kecil. Ini bisa menjadi indikasi adanya tantangan konsistensi atau penyesuaian terhadap sistem pengelolaan kinerja yang baru.

Pada tahun 2022, capaian kembali meningkat menjadi 100,85%, menandakan perbaikan dari tahun sebelumnya dan mengindikasikan bahwa langkah-langkah penguatan kapasitas ASN mulai kembali efektif. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian 106,38%, yang merupakan salah satu pencapaian tertinggi selama lima tahun terakhir. Peningkatan ini dapat mencerminkan keberhasilan program pelatihan, *coaching*, serta sistem penilaian kinerja berbasis hasil yang mulai terintegrasi.

Namun, di tahun terakhir, 2024, capaian menurun ke 96,67% meskipun targetnya sudah dinaikkan. Penurunan ini bisa mencerminkan dinamika internal, seperti redistribusi beban kerja, adanya pegawai baru yang masih dalam tahap adaptasi, atau tantangan dalam mempertahankan standar tinggi secara berkelanjutan. Meski demikian, capaian masih tergolong tinggi dan tetap menunjukkan bahwa profesionalitas ASN berada dalam kondisi yang baik dan mendukung tercapainya kinerja organisasi secara keseluruhan.

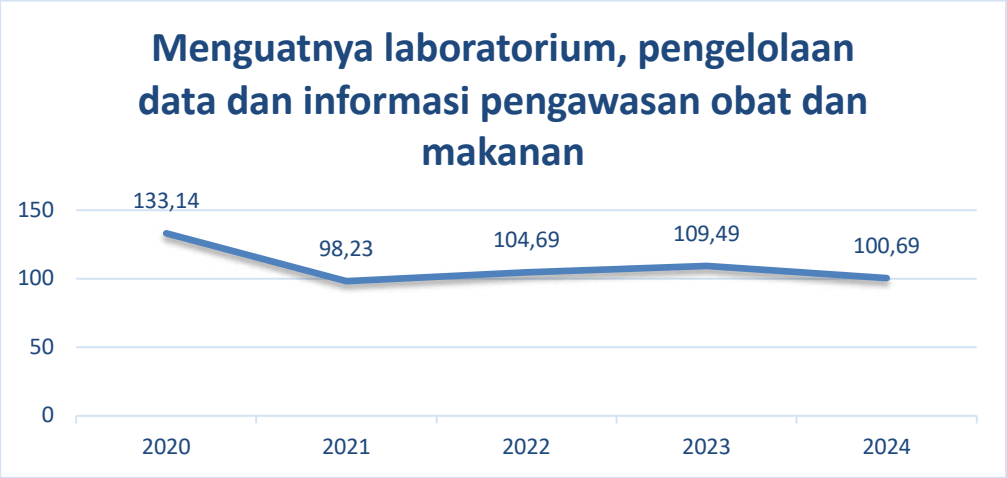
Beberapa upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian SK9 yaitu: a) pengembangan sistem untuk memonitoring capaian pegawai di unit kerja; b) melakukan pemetaan kompetensi ASN secara berkala, sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; c) Melaksanakan kegiatan Feedback Penilaian Kompetensi secara berkala per triwulan.

10. Sasaran Kegiatan 10 (SK10)

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Pemenuhan standar GLP adalah sebagai upaya Laboratorium pengujian Balai Besar POM di Palembang untuk memenuhi Standar Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter standar ruang lingkup, standar alat laboratorium dan standar kompetensi personal laboratorium, alat laboratorium yang digunakan harus terkalibrasi dan dipelihara dengan baik. Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium serta sistem operasional teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Sasaran Kegiatan ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator yaitu (1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan

Makanan sesuai standar GLP; dan (2) Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal.



Gambar 1.1.11. Tren Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palembang Tahun 2020-2024

Selama periode 2020–2024, BBPOM di Palembang mencatat kinerja yang stabil dan positif pada dua indikator utama dalam penguatan laboratorium serta pengelolaan data dan informasi.

Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP (IKSK 30) menunjukkan rata-rata capaian sebesar 99,66%, yang berarti secara umum target tahunan hampir selalu tercapai, meskipun belum konsisten melampaui 100%. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan nilai 101,38%, mencerminkan keberhasilan perbaikan mutu di akhir periode. Namun, capaian sempat berada sedikit di bawah target pada 2021–2023 (sekitar 98%), yang menandakan perlunya perhatian berkelanjutan dalam mempertahankan standar GLP secara menyeluruh.

Sementara itu, Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palembang (IKSK 31) menunjukkan rata-rata capaian sebesar 118,83%, dengan capaian luar biasa di tahun 2020 (165,56%) dan tetap stabil di atas 100% pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini menggambarkan percepatan transformasi digital dan efektivitas sistem pengelolaan informasi yang berhasil dipertahankan.

Gabungan kinerja kedua indikator ini menunjukkan bahwa BBPOM di Palembang telah berhasil membangun landasan kuat dalam hal kapasitas laboratorium yang sesuai standar serta sistem informasi yang terintegrasi dan optimal, sebagai bagian penting dari efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

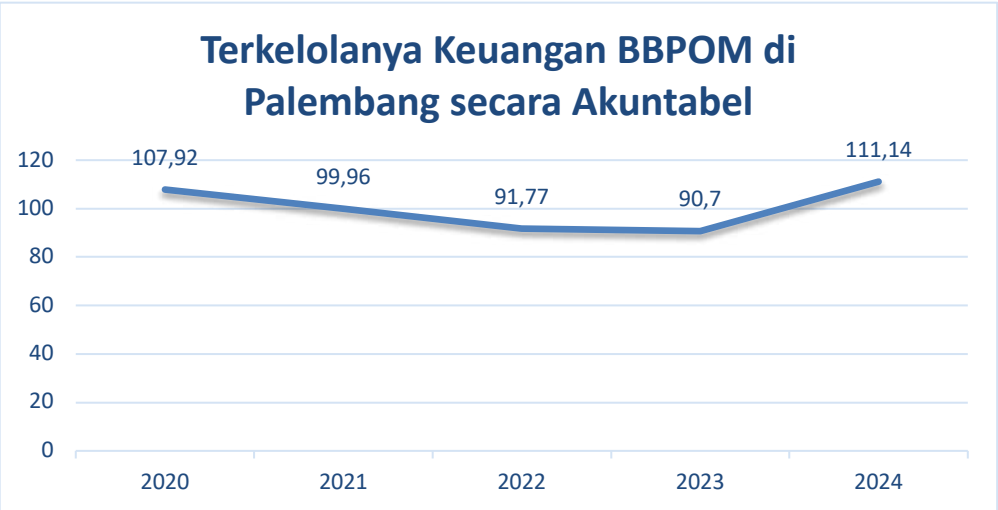
Beberapa upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian SK10 yaitu: a) monitoring evaluasi SKL secara berkala (triwulan) sehingga jika ada kendala pada pemenuhannya dapat segera ditangani; b) monitoring secara

berkala aspek-aspek yang mempengaruhi penilaian pengelolaan data dan informasi pada BBPOM di Palembang.

11. Sasaran Kegiatan 11 (SK11)

Terkelolanya Keuangan BBPOM di Palembang secara Akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BBPOM di Palembang dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Sasaran kegiatan ini diukur menggunakan 4 (empat) indikator yaitu: (1) Nilai Kinerja Anggaran; (2) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa; (3) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara; dan (4) Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri.



Gambar 1.1.12. Tren Terkelolanya Keuangan BBPOM di Palembang secara Akuntabel Tahun 2020-2024

Selama periode 2020–2024, indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT (IKSK 32) digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan anggaran di BBPOM di Palembang. Di dua tahun pertama (2020–2021), penilaian efisiensi masih disajikan sebagai indikator tersendiri melalui IKSK 33 – Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran, yang masing-masing menunjukkan capaian 111,11% dan 108,7% pada tahun 2021, menandakan penggunaan anggaran yang sangat efisien dan melebihi ekspektasi target.

Mulai tahun 2022, aspek efisiensi ini tidak lagi diukur terpisah, melainkan terintegrasi dalam sistem penilaian IKSK 32. Oleh karena itu, mulai tahun tersebut, nilai IKSK 32 mencerminkan tidak hanya efektivitas realisasi anggaran tetapi juga efisiensi penggunaannya. Namun demikian, performa IKSK 32 setelah integrasi cenderung menurun bila dibandingkan dengan dua tahun awal. Namun perbaikan yang signifikan pada tahun 2024, dengan capaian di atas 100%, menunjukkan bahwa BBPOM di Palembang berhasil melakukan penyesuaian dan penguatan pengelolaan anggaran secara

keseluruhan.

Pada tahun 2024, tiga indikator tambahan digunakan sebagai penguat penilaian akuntabilitas keuangan:

- Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (IKSK 34) mencapai 105,99% dari target;
- Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (IKSK 35) sebesar 105,18%; dan
- Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (IKSK 36) justru melampaui target secara signifikan dengan capaian 132,17%, menunjukkan komitmen terhadap kebijakan afirmatif pemerintah dalam pengadaan barang lokal.

Secara umum, indikator-indikator pada sasaran kegiatan ini mencerminkan upaya yang konsisten dalam menjaga transparansi, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan negara di lingkungan BBPOM Palembang. Kendati beberapa fluktuasi terjadi, terutama pada indikator kinerja anggaran di tengah periode, organisasi menunjukkan kemampuan untuk melakukan koreksi dan perbaikan, sebagaimana terlihat dari peningkatan capaian di tahun terakhir.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian SK11 yaitu: a) Melakukan secara lebih cermat kegiatan-kegitan yang ada di Keuangan seperti: revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, pengelolaan UP, rekon LPJ bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, retur SP2D, perencanaan kas (Renkas), pengembalian/kesalahan SPM, dispensasi penyampaian SPM, pagu minus, konfirmasi capaian output; b) meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran; c) pelaporan kinerja melalui aplikasi SAKTI secara tepat waktu dengan data yang akurat; d) monitoring evaluasi nilai kualitas pengelolaan barang jasa, pengelolaan Barang Milik Negara, dan penggunaan produk dalam negeri serta peningkatan koordinasi dengan Unit Pengampu sehingga dapat segera menindaklanjuti kekurangan dengan tepat.

1.1.2.Aspirasi *Stakeholder*

Dalam menghadapi tantangan masa depan, BBPOM di Palembang memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan obat dan makanan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, tapi juga memungkinkan BBPOM di Palembang untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi. Pengawasan obat dan makanan bukanlah tugas yang statis, diperlukan

adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka mewadahi aspirasi masyarakat, BBPOM di Palembang melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis BBPOM di Palembang 2025-2029. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang tidak hanya memenuhi standar global, tapi juga menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara khusus.

Forum Konsultasi Publik tersebut diikuti oleh lintas sektor, pelaku usaha, akademi, organisasi profesi hingga awak media masa. Sedangkan, SKM respondennya adalah masyarakat yang telah menerima layanan dari BBPOM di Palembang. Berdasarkan hasil dan laporan kegiatan tersebut dapat disimpulkan beberapa aspirasi dan harapan masyarakat dalam peningkatan kinerja BBPOM di Palembang antara lain:

- BPOM dapat melakukan pengawasan secara lebih menyeluruh terutama di daerah perifer.
- BBPOM di Palembang diharapkan agar secara intensif melakukan pengawasan produk yang beredar secara *online.*
- BBPOM di Palembang agar secara intensif memberikan sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat secara *offline* dan *online* di berbagai media sosial resmi yang dimiliki BBPOM di Palembang.
- BBPOM di Palembang meningkatkan fasilitas pelayanan publik untuk kelompok rentan.
- BBPOM di Palembang melakukan sosialisasi lebih intens kepada lintas sektor terkait Aplikasi BPOM Mobile.
- BBPOM di Palembang memberikan tindaklanjut atas hasil magang/penelitan untuk peningkatan kinerja.
- BBPOM di Palembang dapat menyatakan sanksi, kompensasi serta poin-poin perbaikan terus menerus pada Maklumat Pelayanan.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam menyusun Renstra BBPOM di Palembang 2025-2029, memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan

global dan nasional. BBPOM di Palembang sebagai UPT BPOM yang bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di Sumatera Selatan, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan publik. Tantangan ini termasuk mengatasi ancaman kesehatan yang muncul (*emerging diseases*), yang memerlukan kesiapsiagaan dan responsivitas sistem pengawasan yang tinggi. Masa depan pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan menuntut adaptasi dan inovasi yang responsif terhadap dinamika global, ancaman kesehatan yang berpotensi muncul dan perkembangan teknologi. Dengan mengidentifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang perlu diatasi, BBPOM di Palembang dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif. Rencana strategis ini akan menjadi panduan dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap akses produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), BBPOM di Palembang menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan. Pendekatan ini, dapat mengidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat.

1.2.1.*Kekuatan (Strength)*

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki BBPOM di Palembang, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh BBPOM di Palembang, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Komitmen Kepemimpinan yang Kuat

Kepemimpinan yang strategis, progresif dan inovatif sangat penting dalam memastikan BBPOM di Palembang mampu menavigasi lingkungan yang terus berubah dengan kompleksitas dan dinamika yang meningkat. Dengan fokus pada pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan berkualitas, kepemimpinan memastikan tidak hanya beradaptasi dengan tantangan saat ini tetapi juga proaktif mengantisipasi perubahan di masa

depan. Melalui penerapan strategi yang matang dan pengambilan keputusan yang bijaksana, dan memperkuat sistem pengawasan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Hal ini ditunjukan dengan pembangunan gedung kantor pada tahun 2021. Pembangunan gedung difokuskan pada lantai 3 dan bagian laboratorium untuk menyesuaikan beberapa tambahan alat laboratorium salah satunya adalah PCR dan tambahan alat pendukung PCR. Ruang pegawai didesain untuk meningkatkan produktif pegawai BBPOM di Palembang. Perlengkapan pada ruang layanan publik juga disesuaikan standar pelayanan publik tatap muka dengan era *new normal* pasca pandemi covid-19, dan hingga saat ini terus ditingkatkan terutama untuk pelayanan kelompok rentan dan disabilitas.

Inisiatif kepemimpinan ini tidak hanya memastikan BBPOM di Palembang tetap relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang berkembang tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat dan industri. Dengan demikian, kepemimpinan BBPOM di Palembang telah memposisikan dan berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ketat, adil, dan transparan. Beberapa penghargaan yang diperoleh BBPOM di Palembang sebagai bukti nyata komitmen untuk terus berkembang adalah sebagai berikut:

a. Terbaik 1 Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dari BPOM RI Tahun 2023;
b. Penghargaan atas Inovasi AMPERA (Amankan Pangan Edukasi Masyarakat) dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023;
c. Penghargaan atas Inovasi CERDIK (Cerita Ringan yang Mendidik) dari H.E ART Tahun 2023;
d. Peringkat Ketiga Pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Teraktif dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang Tahun 2023;
e. Kategori PPID Pelaksana UPT Balai Besar POM sebagai Badan Publik Informatif dari BPOM RI Tahun 2023;
f. Penghargaan 10 UPT Terbaik pada Lomba Penerapan Sistem Mutu *Good Laboratory Practice* (GLP) di Lingkungan BPOM RI Tahun 2024;
g. Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2024 dengan kategori “Pelayanan Prima” dari BPOM RI;
h. Penghargaan atas Inovasi AMPERA (Amankan Pangan Edukasi Masyarakat) sebagai TOP 24 Kompetisi Inovasi (KOIN) BPOM Tahun 2024;
i. Penghargaan sebagai Peringkat Ketiga Kategori UP KKP Besar pada Juni Tahun 2024;
j. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori PPID UPT Tahun 2024;
k. Peringkat Pertama Penilaian Pengguna Digipay Terbaik Periode Semester II Tahun Anggaran 2024 Kategori: UP KKP Besar;

I. Peringkat Pertama Kategori Satuan Kerja Sedang (Jumlah Satker 6-15) Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Tahun 2023;

2. Kerja Sama Lintas Sektor dan Jaringan Kerja sama Yang Solid

BBPOM di Palembang memiliki kekuatan strategis dalam membangun serta mempertahankan jaringan kerja sama lintas sektor yang kokoh dan berkelanjutan. Kolaborasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari instansi pemerintah daerah, industri sediaan farmasi dan pangan olahan, organisasi profesi, hingga perguruan tinggi dan satuan pendidikan. Sinergi tersebut menjadi fondasi penting bagi efektivitas pengawasan obat dan makanan di Sumatera Selatan.

Pada tahun 2024, penguatan kolaborasi diwujudkan melalui penandatanganan komitmen bersama untuk penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) secara konsisten serta pengawalan kualitas garam konsumsi dalam mendukung program percepatan penurunan stunting. Komitmen ini disepakati bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumsel, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Perindustrian, DPMPTSP Kota Palembang, serta pelaku usaha industri garam. Langkah ini menunjukkan bahwa BBPOM di Palembang mampu menjadi motor penggerak kolaborasi multi-sektor untuk isu prioritas nasional.

Selain itu, pelaksanaan pengawasan bersama Pemerintah Daerah telah menjadi pola kerja yang terstandardisasi dan berjalan secara rutin, khususnya dalam mengawasi peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui skema kerja sama ini, pertukaran data dan informasi dapat berlangsung lebih cepat dan akurat, sehingga respons pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Kerja sama strategis ini juga memperluas akses organisasi terhadap teknologi, pengetahuan, dan praktik terbaik (*best practices)* dari berbagai sektor, termasuk akademisi. Keterlibatan universitas dan organisasi profesi memperkuat kapasitas ilmiah, analitis, dan advokasi kebijakan BBPOM di Palembang.

Jaringan kemitraan yang kuat memastikan bahwa kebijakan, program, dan langkah pengawasan yang dilakukan tidak hanya selaras dengan standar nasional maupun global, tetapi juga relevan dengan konteks lokal di Sumatera Selatan. Hal ini menjadi salah satu kekuatan utama yang memperkuat efektivitas sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan

olahan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap BBPOM di Palembang.

3. Sumber Daya Manusia yang Loyal dan Kompeten

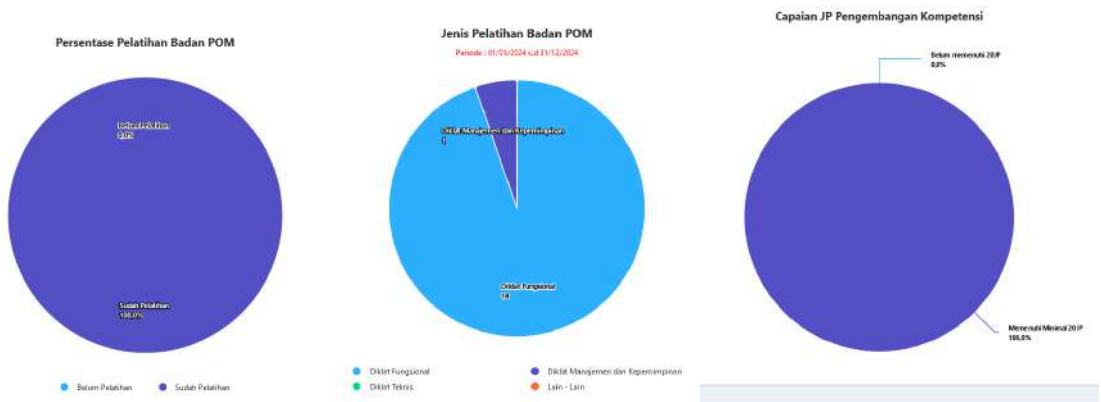
Pelaksanaan rencana strategis BBPOM di Palembang tentunya tidak terlepas dari SDM yang loyal dan kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Pengalaman dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh SDM BBPOM di Palembang merupakan aset penting dalam evaluasi dan pengawasan produk. Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan membutuhkan SDM dengan kompetensi teknis dengan kriteria spesifik sesuai dengan tugas, spesialisasi, dan fungsi pada setiap jabatannya. Dalam memenuhi kebutuhan kompetensi teknis spesifik tersebut, BPOM memiliki 21 jabatan fungsional dengan kompetensi teknis maupun spesialisasi jabatan yang spesifik. Tahun 2024 BBPOM di Palembang memiliki total SDM ASN pada jabatan fungsional sebanyak 81 orang. Dengan sebaran 77% dari pegawai tersebut merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi Makanan, yang terdiri dari 33 pegawai dengan spesialisasi pada fungsi pengujian, 16 pegawai dengan spesialisasi fungsi pemeriksaan, 5 pegawai dengan spesialisasi fungsi penyuluhan (informasi dan komunikasi), 8 pegawai dengan spesialisasi fungsi penindakan. Kompetensi teknis maupun spesialisasi tersebut sangat penting dalam mengidentifikasi risiko, menilai keamanan produk, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berbasis bukti ilmiah. Tidak hanya Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, BPOM juga didukung dengan 23% Jabatan Fungsional.

Tabel 1.1.3. Jumlah Pegawai BBPOM di Palembang POM Per Jabatan Fungsional

No	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai
1	Analis Barang Milik Negara	3
2	Analis Keuangan	1
3	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1
4	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	1
5	Arsiparis Ahli Pertama	1
6	Arsiparis Penyelia	1
7	Pelaksana	2
8	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	6
9	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	24
10	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	23
No	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai
11	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	3

12	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	5
13	Pengelola Barang Milik Negara	1
14	Perencana Ahli Muda	1
15	Perencana Ahli Pertama	1
16	Pranata Keuangan APBN Mahir	1
17	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1
18	Pranata Keuangan APBN Terampil	2
19	Pranata Komputer Ahli Pertama	1
20	Pranata Komputer Mahir	1
21	Pranata SDM Aparatur Mahir	1
Total		81

Kompetensi teknis dan spesialisasi jabatan yang dimiliki oleh SDM BBPOM di Palembang tidak hanya berperan dalam aspek pengawasan, tetapi juga dalam pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan terkini dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini mencakup tanggapan terhadap tantangan baru yang muncul, seperti kemunculan produk inovatif, bahan dan kontaminan baru yang memerlukan evaluasi khusus dan metodologi pengujian yang diperbaharui. Untuk memastikan kemampuan tersebut tetap terjaga dan berkembang, BBPOM di Palembang secara rutin melaksanakan pelatihan teknis dan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi seluruh SDM-nya. Berikut pemenuhan pelatihan SDM sampai dengan Desember 2024.



Gambar 1.1.13. Pelatihan SDM Tahun 2024

Penguatan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur utama pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama, melalui penguata manajemen talenta untuk menyiapkan kader kepemimpinan maupun expertise dalam mengawal pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang berkualitas. Pengelolaan dan pembangunan SDM BBPOM di Palembang 2025-2029 dilakukan melalui: 1) Implementasi sistem merit secara konsisten; 2) Implementasi manajemen talenta dalam pembinaan karier secara

konsisten; 3) Pengembangan dan implementasi strategi pembelajaran terintegrasi.; dan 4) Peningkatan ASN yang memiliki kompetensi digital.

Dengan mengandalkan pengalaman dan keahlian teknis yang komprehensif, BBPOM di Palembang dapat merancang strategi pengawasan yang tidak hanya efektif namun juga inovatif, menjamin perlindungan terbaik bagi kesehatan masyarakat di Sumatera Selatan.

4. Peralatan Laboratorium dan Metode Pengujian yang Mutakhir

BBPOM di Palembang memiliki infrastruktur laboratorium yang modern sebagai salah satu kekuatan utama dalam menjalankan fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. BBPOM di Palembang memberikan komitmen penuh untuk Standar Ruang Lingkup adalah acuan yang digunakan untuk menilai kemampuan laboratorium dalam melakukan pengujian kimia dan biologi, terdiri dari obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif (nappza), obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, mikrobiologi dan biologi molekuler yang menggambarkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium. Salah satu aspek yang harus dilakukan dalam meningkatkan kemampuan laboratorium adalah bertambahnya jenis sampel dan jumlah parameter pengujian yang dilakukan. Investasi pada peralatan mutakhir telah memenuhi standar peralatan pengujian dasar maupun peralatan penunjang, yang seluruhnya dimonitor dan dievaluasi secara berkala. Beberapa contoh peralatan laboratorium yang telah dimiliki antara lain ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry), GC-MS/MS (Gas Chromatography–Tandem Mass Spectrometry), RT-PCR (Real-Time Polymerase Chain Reaction), dan berbagai instrumen pengujian lain yang berstandar tinggi. Ketersediaan peralatan tersebut memastikan proses evaluasi keamanan dan mutu produk dilakukan secara akurat, sensitif, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari potensi risiko produk berbahaya.



Gambar 1.1.14 Nilai SKL Balai Besar POM di Palembang Tahun 2020-2024

Standar peralatan dan standar ruang lingkup diperlukan sebagai acuan untuk dalam pemenuhan baik alat laboratorium maupun ruang lingkup pengujian untuk mendukung tercapainya Standar Kemampuan Laboratorium (SKL). Selama Tahun 2020-2024 terjadi peningkatan pemenuhan standar peralatan dan ruang lingkup pengujian BBPOM di Palembang. Bahkan pemenuhan peralatan selama periode tersebut mendapatkan penilaian yang cukup signifikan bergerak dari 2020 hingga 2024 yaitu dari 59,2 menjadi 81,94.

5. Kapasitas Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

BBPOM di Palembang aktif dalam mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam isu keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan. Dengan melaksanakan program dan kampanye edukasi yang terstruktur, sebagai bentuk upaya menyampaikan informasi penting kepada publik dan menginspirasi partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi produk sediaan farmasi dan pangan olahan, salah satunya melalui implementasi Inovasi AMPERA (Amankan Produk Edukasi masyaRAkat). Masyarakat dapat dengan mudah melaporkan atau menginformasikan kecurigaan atas suatu produk melalui *gadget* masing-masing. Keterlibatan ini memainkan peran strategis dalam menguatkan sistem pengawasan dari dalam, sambil membangun kesadaran dan pemahaman luas mengenai pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Dengan demikian, pendekatan edukasi dan pemberdayaan ini mengajak masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam mendukung inisiatif kesehatan publik, mengkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman dan sehat bagi semua.

Masyarakat merupakan satu elemen utama dalam sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Keterlibatan masyarakat dalam sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan tidak hanya meningkatkan efektivitas upaya pengawasan, tetapi juga mengukuhkan jaringan keamanan produk secara menyeluruh. Edukasi dan pemberdayaan ini membuat masyarakat menjadi lebih sadar dan peduli terhadap kualitas serta keamanan produk yang mereka gunakan, mendorong perilaku konsumsi yang bertanggung jawab. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan produk yang mencurigakan atau tidak memenuhi standar sangat membantu dalam mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko kesehatan masyarakat dengan lebih cepat dan efektif. Kemitraan strategis ini antara masyarakat dan BBPOM di Palembang merupakan aspek penting dalam memastikan keamanan produk untuk kesejahteraan semua orang.

6. Balai Besar POM di Palembang Telah Terakreditasi ISO/IEC 17025:2017; ISO 9001:2018; ISO 37001:2016

BBPOM di Palembang berkomitmen untuk terus meningkatkan kapabilitas kelembagaan melalui penjaminan mutu sistem laboratorium, proses bisnis dan integritas pegawai melalui akreditasi ISO/IEC/ 17025:2017; ISO 9001:2018; dan ISO 37001:2016. Laboratorium pengujian BBPOM di Palembang telah mendapatkan sertifikat ISO/IEC 17025 sejak Tahun 2002. Selanjutnya pada tahun 2011 BBPOM di Palembang mendapatkan akreditasi ISO 9001; dan pada tahun 2024 mendapatkan akreditasi ISO 37001. Dengan terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 BBPOM di Palembang memastikan bahwa laboratorium memiliki sistem manajemen yang profesional dan menghasilkan data yang valid. Akreditasi ini memberikan kepercayaan kepada pelanggan dan pemangku kepentingan bahwa hasil pengujian dan kalibrasi yang dilakukan adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, akreditasi ini juga membantu laboratorium BBPOM di Palembang meningkatkan efisiensi operasional dengan mengidentifikasi dan mengatasi kekurangan dalam sistem manajemen mutu dan kompetensi teknis. Akreditasi ISO/IEC 17025:2017 merupakan langkah strategis dalam meningkatkan mutu, kepercayaan, serta daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Perolehan akreditasi ISO 37001:2016 menunjukkan BBPOM di Palembang telah membangun, menerapkan, memelihara, dan memperbaiki system manajemen yang efektif dalam menangani risiko penyuapan. Standar ini menyediakan panduan bagi BBPOM di Palembang untuk mengembangkan kebijakan, prosedur, dan kontrol yang sesuai guna mencegah dan menangani tindakan penyuapan di semua aspek operasionalnya. Dengan demikian, BBPOM di Palembang dapat menunjukkan komitmen yang kuat terhadap etika bisnis dan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku (undang-undang anti-penyuapan) sehingga dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan di mata pemangku kepentingan dan masyarakat. Sedangkan akreditasi ISO/:2018 membuktikan komitmen BBPOM di Palembang untuk meningkatkan efektivitas manajemen mutu dengan pendekatan berbasis proses (*process-based approach*) untuk mencapai perbaikan berkelanjutan *(continuous improvement)*. Sehingga, organisasi memastikan tercapainya visi, misi dan tujuan secara konsisten baik dalam hal pengendalian keseluruhan proses dan ketercapaian seluruh tujuan organisasi dari aspek kualitas maupun kuantitas. Struktur organisasi BBPOM di Palembang tidak dapat dipisahkan dari penatalaksanaan yang meliputi penataan hubungan kerja antar unit organisasi dan penataan proses bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Penatalaksanaan BBPOM di Palembang telah dijalankan dan diintegrasikan dengan penyelenggaraan sistem pengendalian intern berbasis

manajemen risiko dan manajemen mutu melalui penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi.

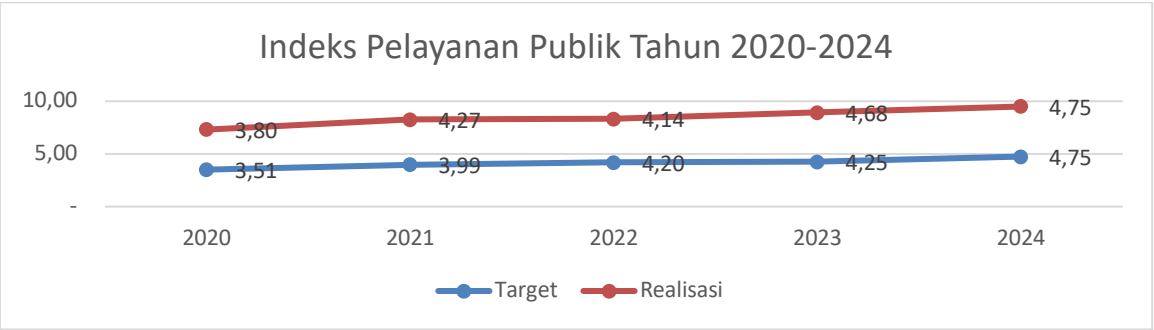
7. Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang Telah Memperoleh Predikat Pelayanan Prima

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan instrumen penilaian kinerja unit pelayanan publik yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Sejak tahun 2023, Balai Besar POM di Palembang berhasil meraih predikat *Pelayanan Prima*, yang menunjukkan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi standar kualitas tertinggi berdasarkan parameter nasional.

Pencapaian ini merupakan hasil dari berbagai upaya strategis, antara lain penyusunan dan pemutakhiran Standar Pelayanan Publik (SPP), peningkatan kompetensi dan profesionalisme petugas pelayanan, serta penguatan mekanisme *service delivery* melalui inovasi-inovasi yang memudahkan akses dan mempercepat proses layanan bagi para pemangku kepentingan. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai, termasuk fasilitas ramah disabilitas, sistem antrean yang lebih tertib, serta digitalisasi layanan, turut berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan.

Konsistensi penerapan budaya 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) juga menjadi elemen penting dalam membangun pengalaman layanan yang positif bagi masyarakat dan pelaku usaha. Budaya ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga memperkuat citra Balai Besar POM di Palembang sebagai institusi publik yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

Selama periode 2020–2024, nilai IPP Balai Besar POM di Palembang menunjukkan tren peningkatan yang mencerminkan keberhasilan implementasi program peningkatan kualitas pelayanan, sebagai berikut :



Gambar 1.1.15 Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang Tahun 2020-2024

Perbaikan berkelanjutan ini tidak hanya menjadi indikator kinerja, tetapi juga wujud nyata komitmen organisasi dalam menyediakan layanan yang akuntabel dan berintegritas.

Salah satu bentuk penguatan integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Melalui pembangunan ZI, berbagai aspek tata kelola diperbaiki secara sistematis, mulai dari penguatan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan SDM aparatur, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga inovasi pelayanan. Upaya ini menjadi pondasi penting dalam memastikan bahwa predikat Pelayanan Prima dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

1.2.2.Kelemahan *(Weakness)*

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan obat dan makanan yang terus meningkat, BBPOM di Palembang tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi BPOM menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja BBPOM di Palembang dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan *(weakness)* yang dimiliki oleh BBPOM di Palembang, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

1. **Keterbatasan Jumlah dan Distribusi Sumber Daya Manusia (SDM)**

Keterbatasan jumlah dan distribusi sumber daya manusia (SDM) yang dihadapi BBPOM di Palembang berdampak langsung pada kemampuan untuk menjalankan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif dan menyeluruh, terutama di wilayah-wilayah di luar pusat kota besar, terpencil atau kurang terjangkau di Provinsi Sumatera Selatan. Peningkatan jumlah produk beredar dan kenaikan jumlah sarana harus diimbangi dengan ketersediaan petugas agar tugas pengawasan dapat berjalan efektif dan optimal.
Selain itu keterbatasan dalam jumlah dan keahlian SDM membatasi kapasitas BBPOM di Palembang untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Masyarakat tentang pentingnya konsumsi produk yang aman dan

berkualitas. Kelemahan ini dapat berdampak pada operasional internal BBPOM di Palembang tetapi juga pada perlindungan kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan urgensi dalam mengatasi tantangan jumlah dan distribusi SDM untuk menjaga standar pengawasan yang tinggi dan memenuhi ekspektasi publik di Sumatera Selatan.

Keterbatasan dalam jumlah SDM membatasi kapasitas BBPOM di Palembang untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Hal ini juga menghambat kemampuan BBPOM di Palembang dalam mengadopsi dan menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi terbaru dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, mengurangi efisiensi dan efektivitas operasional. Dampak kelemahan ini tidak hanya terbatas pada operasional internal, tetapi juga pada perlindungan kesehatan masyarakat, menunjukkan urgensi dalam mengatasi tantangan jumlah SDM untuk menjaga standar pengawasan yang tinggi dan memenuhi ekspektasi publik.

Tabel 1.1.4. ABK Balai Besar POM di Palembang Tahun 2024

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jenis	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
1	Kepala Balai Besar POM di Palembang	14	Struktural	1	1	0	100%
2	Kepala Bagian Tata Usaha pada Balai Besar POM di Palembang	12	Struktural	1	1	0	100%
3	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10	Fungsional	1	0	1	0%
4	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	Fungsional	1	1	0	100%
5	Arsiparis Ahli Pertama	8	Fungsional	1	1	0	100%
6	Arsiparis Penyelia	8	Fungsional	1	1	0	100%
7	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	12	Fungsional	11	7	4	64%
8	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	10	Fungsional	30	21	9	70%
9	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	8	Fungsional	32	25	7	78%
10	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	7	Fungsional	0	2	-2	0%%
11	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	8	Fungsional	0	5	-5	0%%
12	Perencana Ahli Muda	10	Fungsional	2	1	1	50%
13	Perencana Ahli Pertama	8	Fungsional	3	2	1	67%
14	Pranata Keuangan APBN Mahir	8	Fungsional	1	1	0	100%
15	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	Fungsional	1	1	0	100%

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jenis	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
16	Pranata Keuangan APBN Terampil	7	Fungsional	2	2	0	100%
17	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	Fungsional	1	1	0	100%
18	Arsiparis Terampil	6	Fungsional	2	1	1	50%
19	Penata Kelola Obat dan Makanan	7	Pelaksana	0	1	-1	0%%
20	Penata Layanan Operasional	7	Pelaksana	0	4	-4	0%%
21	Pengelola Layanan Operasional	6	Pelaksana	0	1	-1	0%%
22	Pengolah Data dan Informasi	6	Pelaksana	0	1	-1	0%%
23	Analis Anggaran Ahli Madya	12	Fungsional	0	0	0	0%%
24	Analis Anggaran Ahli Muda	10	Fungsional	1	0	1	0%
25	Analis Anggaran Ahli Pertama	8	Fungsional	0	0	0	0%%
26	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12	Fungsional	1	1	1	100%
27	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8	Fungsional	1	0	1	0%
28	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	10	Fungsional	1	0	1	0%
29	Arsiparis Ahli Muda	9	Fungsional	1	0	1	0%
30	Arsiparis Mahir	7	Fungsional	1	0	1	0%
31	Penata Laksana Barang Mahir	8	Fungsional	2	0	2	0%
32	Penata Laksana Barang Terampil	7	Fungsional	3	0	3	0%
33	Perencana Ahli Madya	12	Fungsional	1	0	1	0%
34	Pranata Komputer Ahli Muda	9	Fungsional	1	0	1	0%
35	Pranata Komputer Mahir	7	Fungsional	1	0	1	0%
36	Pranata Komputer Penyelia	8	Fungsional	1	0	1	0%
37	Pranata Komputer Terampil	6	Fungsional	2	0	2	0%
38	Pranata SDM Aparatur Mahir	7	Fungsional	1	0	1	0%
39	Pranata SDM Aparatur Terampil	6	Fungsional	1	0	1	0%

BBPOM di Palembang masih memiliki beberapa formasi yang belum terisi, terutama pada subbagian tata usaha, seperti jabatan pada pengelolaan keuangan, analis anggaran, analis SDM, penata laksana barang dan seterusnya. Jika tidak direspon secara tepat, BBPOM di Palembang berisiko mengganggu kinerja pengawasan. BBPOM di Palembang harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten agar dapat mendukung pelaksanaan pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

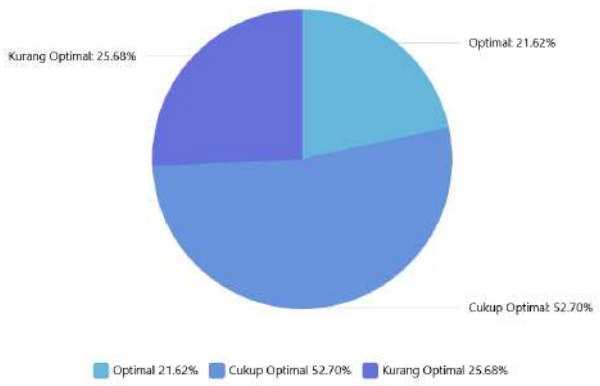
di Sumatera Selatan. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

2. *Gap* Kompetensi Manajerial Pegawai

Kesenjangan kompetensi di antara pegawai menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius untuk memastikan efektivitas lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Ketidakseimbangan ini menciptakan inefisiensi dalam alur kerja, di mana sebagian pegawai mungkin merasa kelebihan beban sementara lainnya kurang dimanfaatkan. Situasi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan di antara staf tetapi juga menurunkan kinerja keseluruhan, karena tugas-tugas kritis mungkin tidak diselesaikan dengan standar yang diperlukan atau dalam waktu yang tepat. Kesenjangan kemampuan ini juga menimbulkan tantangan dalam menjaga kualitas dan konsistensi prosedur pengawasan yang harus dijalankan dengan presisi.

Jika tidak segera diatasi, kesenjangan kompetensi antar pegawai dapat mengancam kemampuan BBPOM di Palembang untuk menjaga standar keamanan obat dan makanan. Tugas-tugas pengawasan memerlukan pemahaman mendalam dan keahlian yang seragam di seluruh organisasi untuk memastikan bahwa semua regulasi dan standar dipatuhi dengan baik. Oleh karena itu, menjembatani kesenjangan kompetensi melalui pelatihan yang seragam dan berkelanjutan adalah kunci untuk mempertahankan keandalan dan integritas lembaga pengawas ini

Berdasarkan hasil penilaian kompetensi yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan pada periode 2020- 2024 capaian kompetensi SDM saat ini sebanyak 16 Pegawai dengan nilai optimal (nilai lebih dari standar), 39 pegawai dengan nilai cukup optimal (masuk ke dalam *range* nilai standar) dan 19 pegawai dengan nilai kurang optimal (nilai kurang dari standar).



Gambar 1.1.16. Proporsi Pemenuhan Standar Kompetensi SDM BBPOM di Palembang

Berdasarkan hasil penilaian kompetensi diperoleh kesenjangan/gap kompetensi pada kompetensi manajerial terkait Pengembangan diri dan Orang Lain, Mengelola Perubahan. Adapun standar kompetensi yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian kompetensi mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017. Adapun gap kompetensi menjadi salah satu acuan dalam pengembangan kompetensi.

3. **Data Belum Terintegrasi Secara Optimal Dalam Bank Data**

Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini mencerminkan bagaimana BPOM secara proaktif dan responsif memperbarui standar dan metodologi pengawasannya untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis dan perkembangan sains dan teknologi. Sistem aplikasi dan data yang terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital harus dilakukan BBPOM di Palembang melalui:

a. Ketersediaan kompetensi SDM yang mumpuni;
b. Sistem basis data dan informasi yang akurat dan terintegrasi untuk memberikan kemudahan dalam pengambilan Keputusan;
c. Kapabilitas dukungan infrastruktur yang andal.

Tantangan yang dihadapi BBPOM di Palembang adalah belum terintegrasinya aplikasi yang tersedia, sehingga data dasar tersebar di masing-masing substansi. Data-data ini harus diselaraskan, dianalisis dan diinterpretasikan dengan tepat agar menjadi sumber informasi yang penting dan bermaknasebagai dasar pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan bagi pimpinan. BBPOM di Palembang perlu melakukan upaya pengembangan data Pengawasan yang terintegrasi agar dapat dianalisis dan diinterpretasikan dengan tepat sebagai dasar pengambilan kebijakan. Sistem aplikasi dan data yang terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sejalan dengan tuntutan dan perkembangan pasar yang cepat serta ekspektasi publik untuk standar keselamatan yang tinggi.

1.2.3.Peluang *(Opportunity)*

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan obat dan makanan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi BBPOM di Palembang untuk memposisikan dirinya sebagai UPT BPOM yang proaktif dan inovatif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh

BBPOM di Palembang untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan:

1. **Adaptasi perkembangan teknologi informasi untuk mendukung implementasi *good governance* dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan**

Adaptasi terhadap perkembangan teknologi baru meningkatkan kapasitas BPOM untuk beroperasi sebagai lembaga pengawasan yang dinamis dan adaptif. Adopsi inovasi teknologi ini mencerminkan komitmen BPOM untuk menjaga keamanan publik dan menegakkan regulasi di industri yang terus berubah dengan cepat. Peluang BBPOM di Palembang dalam digitalisasi proses bisnis merupakan langkah maju menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan menerapkan teknologi digital dalam alur kerjanya. BBPOM di Palembang menangkap peluang ini melalui digitalisasi dan kemudahan dalam pemberian pelayanan publik. Berbagai inovasi pelayanan publik basis digital dikembangkan untuk memenuhi harapan Masyarakat Sumatera Selatan. Peningkatan kompetensi pegawai BBPOM di Palembang terkait teknologi informasi dan digitalisasi terus dilakukan melalui pembelajaran *e-learning* maupun *onsite*. Kemampuan dalam pemanfaatan teknologi AI diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan yang dibutuhkan dalam pengawsan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

2. **Meningkatnya ekspektasi masyarakat Sumatera Selatan terhadap kinerja pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai subyek dan sasaran kegiatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Masyarakat juga memiliki peran strategis dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan menjadi konsumen yang cerdas agar terhindar dari produk yang berbahaya bagi kesehatan. Hasil Indeks kepuasan masyarakat Sumatera Selatan terhadap kinerja pengawasan BBPOM di Palembang selama periode 2020-2024 menunjukkan kenaikan signifikan. Kepuasan Masyarakat tersebut sejalan dengan harapan adanya peningkatan kualitas kinerja BBPOM di Palembang dalam pengawasan produk dan sarana Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; pengujian; sosialisasi dan KIE; serta dalam pendampingan penerbitan izin edar.



Gambar 1.1.17. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

BBPOM di Palembang harus dapat menangkap peluang harapan masyarakat Sumatera Selatan dalam menjadi aspek pertimbangan yang penting menyusun perencanaan kegiatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang optimal.

3. Tren Positif Pertumbuhan Industri Pangan Olahan di Sumatera Selatan

Pertumbuhan industri pangan olahan di Sumatera Selatan menunjukkan dinamika yang semakin kompetitif dalam empat tahun terakhir. Jumlah sarana pangan olahan yang memiliki izin edar BPOM meningkat dari 70 sarana pada tahun 2020 menjadi 191 sarana pada tahun 2024. Tren ini juga tercermin dari meningkatnya permohonan izin edar, yang menandakan bertambahnya pelaku usaha baru serta perluasan lini produk dari industri yang sudah berkembang. Kondisi ini mencerminkan potensi ekonomi sektor pangan olahan yang kuat dan semakin terbuka bagi penguatan pengawasan serta pembinaan keamanan pangan.

Dukungan pemerintah daerah melalui alokasi DAK Non Fisik turut mempercepat peningkatan kapasitas UMKM pangan di berbagai kabupaten/kota. Kolaborasi Pemerintah Daerah bersama BBPOM di Palembang memperluas akses pendampingan, sehingga pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks ini, BBPOM di Palembang memiliki posisi strategis untuk memanfaatkan momentum pertumbuhan industri. Selain memastikan keamanan dan mutu produk yang beredar, BBPOM juga berperan menciptakan kepastian berusaha bagi pelaku industri melalui proses pembinaan dan pendampingan yang kredibel, transparan, dan akuntabel.

Inovasi pendampingan UMKM seperti PEMPPEK (Pendampingan dalam Pemenuhan Persyaratan Perizinan Produk) menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong percepatan pemenuhan standar keamanan

pangan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kepatuhan pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan efisiensi proses perizinan dan daya saing produk pangan olahan lokal.

Dengan semakin terbukanya peluang pengembangan industri pangan, pemenuhan standar keamanan dan perluasan akses perizinan berkontribusi langsung pada peningkatan daya saing produk Sumatera Selatan. Pada akhirnya, optimalisasi peluang ini oleh BBPOM di Palembang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan obat dan makanan, BBPOM di Palembang memiliki peluang strategis untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dengan masyarakat Sumatera Selatan. Edukasi publik merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi pangan dan obat-obatan yang tidak aman. Pemanfaatan berbagai platform komunikasi, seperti media sosial, seminar, workshop, dan kampanye publik dapat menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya keamanan pangan dan obat-obatan tetapi juga memotivasi mereka untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pengawasan produk yang beredar di masyarakat.

Berdasarkan capaian indeks efektivitas KIE tahun 2019-2023 terlihat bahwa terjadi peningkatan untuk setiap komponen indikatornya. Indikator yang paling tinggi kontribusinya adalah Indikator Manfaat yang artinya peserta KIE dapat menerima manfaat dari KIE yang diberikan oleh BBPOM di Palembang. Sedangkan, indikator yang memiliki indeks terendah adalah minat yang artinya perlu ditingkatkan lagi upaya untuk meningkatkan minat masyarakat dalam KIE Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan KIE baik dari konsep kegiatan, materi/konten, narasumber, media yang dipilih dan lain-lain.

Dari sisi implikasi strategis, upaya peningkatan kesadaran ini dapat berujung pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi dan standar keamanan pangan dan obat, yang pada gilirannya meminimalisir risiko kesehatan publik. Lebih lanjut, penguatan kerjasama dan kepercayaan antara BPOM dan masyarakat dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem pengawasan pangan dan obat yang lebih efektif dan responsif. Dengan masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat aktif, potensi untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran akan lebih tinggi, memungkinkan BBPOM di Palembang untuk bertindak cepat dalam menangani isu keamanan pangan dan obat. Pada akhirnya dapat

meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi dan standar keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pengawasan produk yang beredar di Sumatera Selatan. Hasil *awasreness index* Masyarakat Sumatera Selatan menunjukkkan kenaikan signifikan selama 2020-2024.



Gambar 1.1.18 Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index)* Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu Tahun 2020-2024

Peluang peningkatan kesadaran Masyarakat Sumatera Selatan ini harus dimanfaatkan BBPOM di Palembang dengan baik, untuk aktif berkolaborasi dengan masyarakat dalam membangun sistem pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang lebih efektif dan responsif di wilayah Sumatera Selatan.

1.2.4.Ancaman (*Threat)*

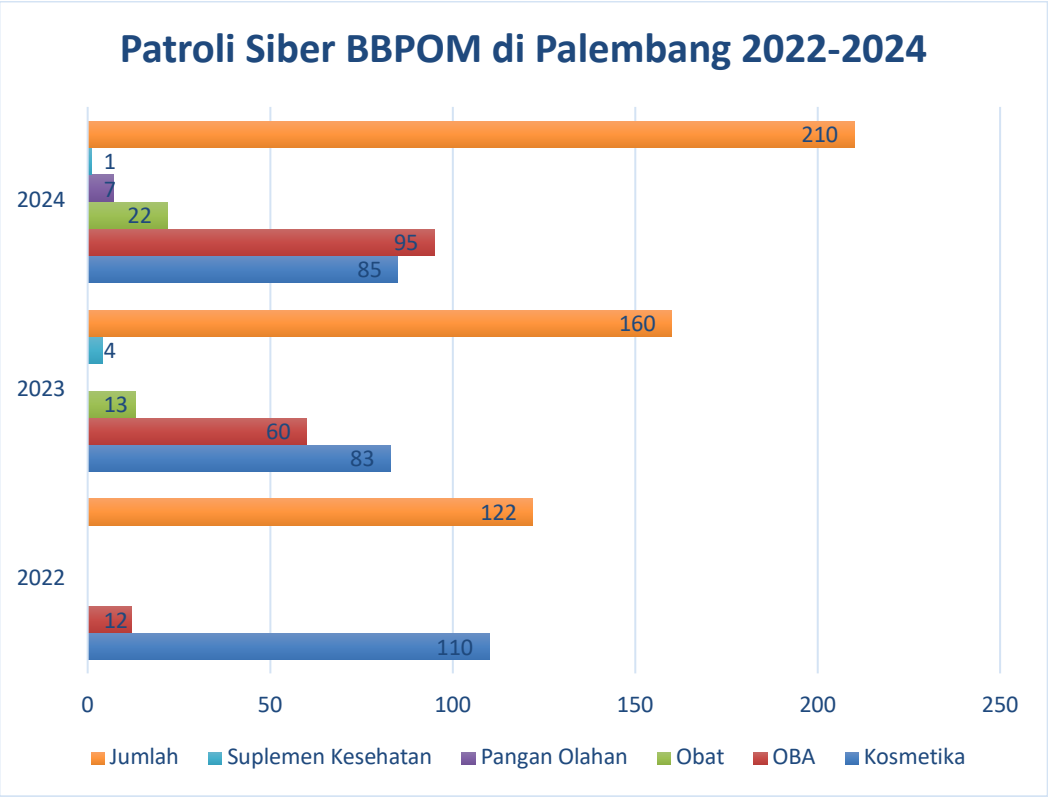
Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga BBPOM di Palembang dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman *(Threat)* yang dapat mempengaruhi dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang:

1. **E-commerce dan kejahatan siber di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan**

Perkembangan teknologi digital dan pergeseran perilaku masyarakat di era *society 5.0* telah mengubah pola konsumsi dan transaksi perdagangan, termasuk dalam pembelian sediaan farmasi dan pangan olahan. Masyarakat di wilayah Sumatera Selatan kini semakin terbiasa memenuhi kebutuhan produk sediaan farmasi dan pangan olahan melalui transaksi daring, tanpa harus mendatangi toko fisik. Perubahan ini mendorong platform e-commerce untuk terus bertumbuh, menawarkan kemudahan, kecepatan, dan jangkauan pasar yang lebih luas.

Namun, ekspansi tersebut juga diikuti oleh meningkatnya risiko kejahatan siber di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Di sejumlah platform, masih ditemukan celah yang dimanfaatkan untuk memperjualbelikan produk ilegal seperti obat palsu, obat tanpa izin edar, kosmetik tidak terdaftar, pangan kedaluwarsa, atau produk impor yang tidak memenuhi ketentuan. Hal ini diperparah dengan mekanisme *user generated content* (UGC) yang memungkinkan setiap pengguna membuat akun dan mengunggah produk tanpa proses verifikasi ketat, sehingga membuka ruang bagi pelaku kejahatan untuk beroperasi relatif bebas.

Kejahatan siber tidak hanya mencakup penipuan daring atau peretasan identitas, tetapi juga penyebaran produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang membahayakan kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil patroli siber BBPOM di Palembang selama 2022–2024, ditemukan berbagai pelanggaran yang melibatkan produk-produk yang dipasarkan kepada konsumen di wilayah Sumatera Selatan.



Gambar 1.1.19 Hasil Patroli Siber Tahun 2022-2024

Ancaman peredaran daring produk ilegal ini menjadi tantangan besar bagi BBPOM di Palembang, mengingat wilayah Sumatera Selatan memiliki karakteristik geografis yang luas, tingkat aktivitas perdagangan daring yang terus meningkat, serta akses konsumen yang semakin mudah terhadap produk lokal maupun impor. Kondisi ini menuntut pengawasan yang lebih

adaptif, cepat, dan terintegrasi, terutama dalam proses identifikasi produk serta penindakan terhadap akun atau pelaku yang memperdagangkan produk ilegal.

Jika tidak dikendalikan, peredaran produk berisiko ini dapat meningkatkan potensi bahaya kesehatan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan, sekaligus mengurangi efektivitas pengawasan obat dan makanan di era digital. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengawasan siber yang dinamis dan inovatif, termasuk peningkatan kapasitas patroli siber, kolaborasi dengan platform e-commerce, penguatan penegakan hukum, serta intensifikasi edukasi kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap produk yang dibeli secara daring.

2. Kondisi Geografi Sumatera Selatan dengan Keberagaman Sosial Kultural Masyarakat

Demografi, epidemiologi, serta kondisi sosial-kultural masyarakat Sumatera Selatan turut memengaruhi jenis dan pola konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan. Perilaku konsumsi yang tidak sesuai ketentuan, baik akibat rendahnya kesadaran maupun terbatasnya pemahaman mengenai keamanan produk menjadi tantangan dalam upaya edukasi terkait penggunaan sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkualitas.

Sumatera Selatan memiliki karakter sosial yang dibentuk oleh keberagaman suku seperti Palembang, Ogan, Komering, Lahat, Serasan, hingga komunitas pendatang dari berbagai daerah di Sumatera maupun Pulau Jawa. Keberagaman ini menciptakan variasi budaya, dialek lokal, serta norma sosial yang memengaruhi penerimaan informasi. Sebagian masyarakat di wilayah pedesaan masih lebih nyaman menggunakan bahasa daerah dan cenderung mengikuti pandangan tokoh adat atau tokoh masyarakat dibandingkan informasi formal dari pemerintah. Keterbatasan pendidikan di beberapa wilayah pedalaman juga berdampak pada rendahnya literasi terkait keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Secara geografis, Sumatera Selatan memiliki wilayah daratan luas yang dilintasi sungai-sungai besar seperti Musi dan anak sungainya, serta kawasan rawa, gambut, dan perbukitan. Kondisi ini menciptakan tantangan tersendiri dalam konektivitas, distribusi informasi, serta pemerataan akses terhadap program pemerintah maupun swasta. Daerah perairan dan desa-desa terpencil seringkali mengalami keterlambatan dalam menerima informasi penting terkait keamanan produk, seperti bahaya kosmetik ilegal, penyalahgunaan obat, tata cara cek izin edar, atau risiko pangan yang tidak memenuhi syarat.

Tantangan geografis dan sosial-kultural tersebut berdampak pada

pelaksanaan pengawasan oleh BBPOM di Palembang. Sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi serta pangan olahan yang tersebar hingga ke wilayah pedalaman dan perairan memperbesar risiko keterlambatan inspeksi dan pengawasan. Hal ini dapat menyebabkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan beredar lebih lama di masyarakat sebelum terdeteksi. Selain itu, keberagaman budaya serta variasi tingkat literasi menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) secara efektif.
Perkembangan tren kesehatan, perubahan perilaku konsumen, serta dinamika demografi juga menuntut petugas untuk terus memperbarui pemahaman dan pendekatan agar regulasi dan pengawasan yang dilakukan tetap relevan dan efektif dalam melindungi kesehatan masyarakat di Sumatera Selatan yang terus berkembang.

3. **Meningkatnya potensi kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan seiring peningkatan proses distribusi dan pemanfaatan pangan MBG**

Dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi (MBG) yang dijalankan secara nasional, terdapat sejumlah potensi ancaman strategis yang perlu mendapat perhatian, salah satunya adalah meningkatnya kemungkinan terjadinya insiden/kejadian luar biasa keracunan pangan (KLB KP). Mengingat program ini mencakup tahapan yang Panjang, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi ke penerima manfaat, kompleksitas alur tersebut dapat meningkatkan kerentanan apabila pengawasan tidak dilakukan secara konsisten.

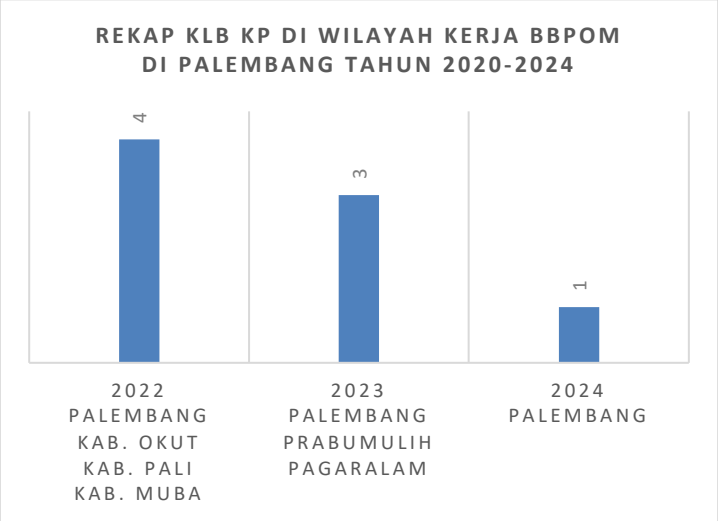
Skala implementasi yang luas, serta perbedaan kapasitas pemenuhan standar produksi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan variasi tata kelola distribusi di masing-masing daerah, dapat menjadi faktor risiko terhadap terjadinya insiden keracunan pangan/KLB KP. Berbagai bentuk kontaminasi dapat muncul akibat praktik higiene yang kurang memadai selama pengolahan, penyimpanan, maupun penanganan pangan yang tidak mengikuti ketentuan.

Dampak dari insiden keracunan pangan tidak hanya berpengaruh pada kesehatan penerima manfaat, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial yang lebih luas, seperti menurunnya kepercayaan masyarakat, terganggunya aktivitas layanan atau pembelajaran, hingga potensi melemahnya persepsi terhadap efektivitas Program MBG sebagai program prioritas nasional.

Dalam konteks pembangunan jangka menengah, isu ini bukan semata tantangan operasional, melainkan ancaman strategis bagi keberlangsungan program. Oleh karena itu, BPOM memegang peran penting dalam menjamin

keamanan, mutu, dan kelayakan pangan dalam Program MBG melalui pendekatan pengawasan yang terstruktur, menyeluruh, dan berbasis risiko.

Sebagai bagian dari upaya mitigasi, BBPOM di Palembang selama periode 2020–2024 telah melakukan pengujian terkait KLB KP di wilayah kerja, sebagai berikut :



Gambar 1.1.20 Rekap KLB KP di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang Tahun 2020-2024

Untuk merespons ancaman ini secara efektif, BBPOM di Palembang perlu mengintensifkan koordinasi lintas sektor dan memperkuat pengawasan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Inspeksi dan pemantauan penyedia makanan MBG secara terjadwal dan berbasis risiko untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan higiene, sanitasi, dan standar mutu produksi.
2. Edukasi dan sosialisasi terpadu kepada pengelola SPPG, pelaku usaha pangan lokal/UMKM, tenaga kesehatan, dan tenaga pendidik mengenai praktik keamanan pangan, penyimpanan, dan penanganan yang aman.
3. Investigasi terpadu atas insiden KLB KP bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk penentuan penyebab, sumber kontaminasi, dan rekomendasi perbaikan teknis.
4. Pengujian laboratorium yang responsif terhadap sampel KLB KP serta mekanisme pelaporan hasil yang cepat untuk mendukung tindak lanjut pengendalian dan komunikasi risiko.

Implementasi langkah-langkah tersebut diharapkan tidak hanya mengurangi frekuensi KLB KP, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan Program MBG di tingkat daerah.

Tabel 1.1.5 Matriks Ringkasan Analisis SWOT

Strength	***Weakness***
1. *Komitmen Kepimpinan yang Kuat* 2. *Kerja sama Lintas Sektor dan Jaringan Kerja Sama yang Solid* 3. *Sumber Daya Manusia yang Loyal dan Kompeten* 4. *Peralatan Laboratorium dan Metode Pengujian yang Mutakhir* 5. *Kapasitas Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan* 6. *Balai Besar POM di Palembang Telah Terakreditasi ISO/IEC 17025:2017; ISO 9001:2018; ISO 37001:2016* 7. *Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang Telah Memperoleh Predikat Pelayanan Prima*	1. *Keterbatasan Jumlah dan Distribusi Sumber Daya Manusia (SDM)* 2. *Gap Kompetensi Manajerial Pegawai* 3. *Data Belum Terintegrasi Secara Optimal Dalam Bank Data*
Opportunities	***Threats***
1. *Adaptasi perkembangan teknologi informasi untuk mendukung implementasi good governance dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan* 2. *Meningkatnya ekspektasi masyarakat Sumatera Selatan terhadap kinerja pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan* 3. *Tren Positif Pertumbuhan Industri Pangan Olahan di Sumatera Selatan* 4. *Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*	1. *E-commerce dan Kejahatan Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan* 2. *Kondisi Geografi Sumatera Selatan dengan Keberagaman Sosial Kultural Masyarakat* 3. *Meningkatnya potensi kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan seiring peningkatan proses distribusi dan pemanfaatan pangan MBG*

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN BBPOM di Palembang

2.1. Visi

Balai Besar POM di Palembang sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan Unit Pelaksana Teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Sumatera Selatan yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029, yaitu :

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sea dan sejahtera. Hal

ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

2.2. Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang

disabilitas", namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Balai Besar POM di Palembang sesuai tugas dan fungsinya mendukung pelaksanaan misi BPOM.

2.3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini

menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Balai Besar POM di Palembang sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM						
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

2.4. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai Besar POM di Palembang, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Palembang akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal

bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
c. Jumlah desa pangan aman
d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase

Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

b. Nilai AKIP UPT BPOM
c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM terkait tugas dan fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator periode 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.4.I Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai Besar POM di Palembang periode 2025-2029

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu *Indikator:* *Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu*	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: **1.** *Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu* **2.** *Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)* **3.** Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029) **4.** *Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan* **5.** *Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan* **6.** *Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan*	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT *Indikator:* 1. *Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 2. *Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO* 3. *Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 4. *Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar* 5. *Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 6. *Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder* 7. *Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 8. *Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 9. *Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 10. *Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 11. *Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan*

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
		pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	*12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar* *13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT* *14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium* 15. *Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman* *16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)*
			Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi *Indikator:* *Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan *Indikator:* *Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan *Indikator:* *Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT *Indikator:* *Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT*
			Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT *Indikator:* *Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar*
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri	Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu *Indikator:*

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM *Indikator:* *Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*	Farmasi dan Pangan Olahan *Indikator:* *Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan*	*Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan*
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu *Indikator:* *Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu*	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu *Indikator:* *Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu*	Meningkatnya efektivitas KIE *Indikator:* 1. *Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT* 2. *Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan* 3. *Jumlah desa pangan aman* 4. *Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas*
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima *Indikator:* *Indeks RB BPOM*	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima *Indikator:* *Indeks RB BPOM*	Layanan Publik UPT yang prima *Indikator:* *Indeks Pelayanan Publik UPT* Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal *Indikator:* *1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM*

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Farmasi dan Pangan Olahan			*2. Nilai AKIP UPT BPOM* *3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM* *4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM*

Balai Besar POM di Palembang perlu melakukan identifikasi risiko untuk setiap sasaran kegiatan. Hal ini untuk mewujudkan pencapaian setiap sasaran kegiatan secara optimal. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan BBPOM di Palembang untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran kegiatan dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko yang disusun merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Identifikasi indikasi risiko sasaran kegiatan BBPOM di Palembang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.2 Matriks Indikasi Risiko

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Timeline pengujian sampel sediaan farmasi, sampel pangan olahan, sampel PIRT dan sampel pangan MBG tidak tercapai	a. Membuat perencanaan pengadaan reagen dan suku cadang sesuai kebutuhan b. Mengusulkan penambahan jumlah alat sesuai kebutuhan c. Melakukan pencatatan dan penghitungan clock on/off timeline dengan mempertimbangkan waktu kerusakan alat	Pengujian
		Petugas bertindak sewenang-wenang kepada pihak sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan	a. Internalisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Pemeriksaan kepada petugas b. Membuat pakta integritas personil/karyawan	Pemeriksaan
		Petugas menerima gratifikasi/penyuapan dari pihak sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan	a. Internalisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Gratifikasi kepada petugas b. Membuat Pakta integritas personil/karyawan	Pemeriksaan
		Petugas yang memiliki benturan kepentingan melaksanakan pemeriksaan sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan terkait	a. Melaporkan benturan kepentingan b. Membuat Pakta Integritas c. Menyusun Rencana Pelaksanaan kegiatan	Pemeriksaan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Kekeliruan petugas dalam menyimpulkan hasil pemeriksaan sehingga tidak tepat dalam pemberian keputusan	Melakukan Internalisasi SOP dan Peraturan Perundang-undangan terkait pemeriksaan kepada petugas	Pemeriksaan
		Petugas dituntut secara hukum oleh pelaku usaha	Melakukan Internalisasi SOP dan Peraturan Perundang-undangan terkait Pemeriksaan kepada petugas	Pemeriksaan
		Hasil pengujian sampel Kejadian Luar Biasa (Kejadian Luar Biasa (KLB) tidak valid	Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk penganggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pengujian
		Kesalahan penentuan parameter uji sampel Kejadian Luar Biasa (KLB)	Menambah kompetensi penguji terkait analisis Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pengujian
		Tidak ditemukan penyebab Kejadian Luar Biasa (KLB)	Menambah kompetensi penguji terkait analisis Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pengujian
		Kesalahan pengambilan hasil keputusan hasil pengujian karena kerusakan sampel sebelum diuji	a. Tersedianya IK Pengelolaan sampel uji b. Pembuatan ruang sampel yang sesuai persyaratan kondisi penyimpanan sampel c. Pemantauan kondisi (suhu) ruang sampel secara konsisten	Pengujian
		Petugas sarana pelayanan kesehatan tidak melaporkan KTD/ESO secara tertib pada aplikasi /*manual report*	a. Melakukan sosialisasi /bimtek kepada sarana pelayanan kesehatan terkait dengan KTD/ESO b. Melakukan Internalisasi monitoring pelaporan KTD/ESO	Pemeriksaan
		Terdapat iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi tidak sesuai dengan ketentuan	Melakukan internalisasi/ sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait evaluasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan	Pemeriksaan
		Rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang disampaikan ke *stake holder* tidak tepat waktu	Melakukan Internalisasi SOP dan Peraturan Perundang-undangan terkait Pemeriksaan kepada petugas	Pemeriksaan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Terdapat sarana yang tidak menerima rekomendasi hasil pengawasan karena tidak dibuat surat rekomendasi	Melakukan Internalisasi SOP dan Peraturan Perundang-undangan terkait Pemeriksaan kepada petugas	Pemeriksaan
		Tidak semua PU kritis dalam sampel sediaan farmasi, sampel pangan olahan, sampel PIRT dan sampel pangan MBG diuji sesuai pedoman sampling	a. Mengusulkan penambahan jenis alat baru sesuai kebutuhan b. Membuat perencanaan pengadaan baku pembanding dan reagensia sesuai kebutuhan c. Membuat usulan pengembangan metode analisa sesuai kebutuhan, melakukan validasi metode analisa yang digunakan di luar ruang lingkup penggunaan	Pengujian
		Sampel yang masuk ke laboratorium menumpuk, banyak PU menggunakan HPLC, waktu analisa menjadi lebih panjang, antri alat hplc	monitoring selama pengujian sampel, pemilihan metode analisa alternatif selain HPLC	Pengujian
		Adanya kasus baru tentang pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan	Mengusulkan pelatihan sesuai dengan MA terbaru	Pengujian
		Kesalahan sampling sampel sediaan farmasi, pangan olahan dalam kemasan, sampel PIRT serta sampel pangan MBG yang tidak disampling sesuai standar	Melakukan Internalisasi Pedoman Sampling 2025	Pemeriksaan
		Petugas tidak mengisi laporan hasil pengawasan sesuai kondisi sesungguhnya	a. Melaporkan benturan kepentingan b. Membuat Pakta Integritas c. Penyusunan Rencana Pelaksanaan kegiatan	Pemeriksaan
		Data dukung penilaian mandiri Kabupaten/Kota pangan aman yang diunggah oleh Kab/Kota tidak sesuai	Petugas BBPOM di Palembang secara berkala melakukan verifikasi data yang diunggah oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota	Pemeriksaan dan Infokom
		Pelaksanaan kegiatan AMR tidak mencapai target pada seluruh komponen yang diperhitungkan	a. Membuat rencana pelaksanaan AMR b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan AMR secara berkala	Pemeriksaan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Terdapat label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi tidak sesuai dengan ketentuan	Melakukan internalisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait evaluasi label produk tembakau/dan atau rokok elektronik	Pemeriksaan
		Persentase penilaian mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman oleh pemerintah Kab/Kota terpilih tidak mencapai target yang ditetapkan	Melakukan pendampingan dengan pembagian tugas penggungjawab dan dilakukan baik secara daring maupun luring	Pemeriksaan dan Infokom
		Tidak semua petugas memahami perlunya pengawasan dan pengisian *tools* AMR pada saat pemeriksaan	a. Melaksanakan sosialisasi *checklist* pemeriksaan yang terdapat *tools* AMR ke petugas pemeriksaan b. Melaksanakan pemeriksaan dengan komposisi 1 orang sebagai katim yang memahami AMR	Pemeriksaan
		Adanya potensi benturan kepentingan dan keberpihakan dalam melakukan pengujian dan memberikan hasil penguian sampel pihak ketiga	a. Setiap penguji menandatangani surat anti benturan kepentingan dan anti gratifikasi b. Melakukan dobel verifikasi hasil pengujian	Pengujian
		Adanya keberpihakan dan penyuapan terhadap kegiatan pengujian serta kerahasiaan hasil pengujian	Tersedia SOP tentang ketidakberpihakan	Pengujian
		Adanya kebocoran informasi tentang hasil laboratorium oleh pihak eksternal	Tersedia SOP tentang kerahasiaan pengujian untuk pihak eksternal	Pengujian
		Gangguan kesehatan serta kecelakaan kerja yang dialami petugas laboratorium	a. Sosialisasi IK K3 dan penggunaan APD b. Membuat sistem hukuman untuk setiap pelanggaran APD c. Rutin melakukan MCU	Pengujian
		Beberapa ruang lingkup tidak dikerjakan	Pembelian sampel khusus pemenuhan ruang lingkup di luar sampling rutin	Pengujian
		Pengadaan alat laboratorium masih rendah	Mengajukan rekomendasi alat ke PPPOMN sesuai jadwal dan aktif memonitor dengan pusat sampai dimana kemajuan usulan tersebut	Pengujian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Tidak semua Parameter Uji diuji lebih dari 2 orang penguji	a. Melaksanakan pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi pengujian b. Melaksanakan pengujian bersama 2 penguji sekaligus	Pengujian
		Banyaknya metode analisa yang belum diverifikasi pada penilaian SKL	Melakukan monitoring capaian verifikasi MA secara berkala	Pengujian
		RI-1 dan RI-2 mengkonsumsi pangan yang tidak memenuhi syarat	a. Pelatihan petugas b. Penilaian kompetensi oleh atasan langsung secara berkala c. Verifikasi laporan secara berjenjang d. Koordinasi yang baik dengan *stake holder* (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Paspampres) bila terjadi kasus *emergency*	Pengujian
2	Meningkatnya efektifitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi	Petugas dituntut secara hukum oleh pelaku usaha sarana produksi pangan fortifikasi	Melakukan Internalisasi SOP dan Peraturan Perundang-undangan terkait Pemeriksaan kepada petugas	Pemeriksaan
		Terjadinya kekeliruan petugas dalam menyimpulkan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasisehingga tidak tepat dalam pemberian keputusan	Melakukan Internalisasi SOP dan Peraturan Perundang-undangan terkait Pemeriksaan kepada petugas	Pemeriksaan
		Petugas bertindak sewenang-wenang kepada pihak sarana produksi pangan fortifikasi	a. Melakukan Internalisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Pemeriksaan kepada petugas b. Membuat Pakta integritas personil /karyawan	Pemeriksaan
		Petugas menerima gratifikasi/penyuapan dari pihak sarana produksi pangan fortifikasi	a. Melakukan Internalisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Gratifikasi kepada petugas b. Membuat Pakta integritas personil /karyawan	Pemeriksaan
		Petugas yang memiliki benturan kepentingan di sarana produksi pangan fortifikasi yang menjadi objek pemeriksaan	a. Melaporkan benturan kepentingan b. Membuat pakta Integritas c. Penyusunan Rencana Pelaksanaan kegiatan	Pemeriksaan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
3	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti KIE/penyuluhan terkait keamanan obat dan makanan secara berkelanjutan	Membuat rencana pelaksanaan KIE sesuai dengan target/sasaran	Infokom
		Pelaporan tahapan kegiatan program SAPA Desa (GKPD), program SAPA Pasar (PPABK), program SAPA Sekolah (PJAS) ke unit Pengampu tidak sesuai *timeline*	a. Memastikan penambahan penanggung jawab program dan pembagian tugas sesuai beban kerja b. Memonitoring pelporan tahapan kegiatan	Infokom
		Petugas menerima gratifikasi dari masyarakat/pelanggan yang mendapat KIE	Penambahan materi terkait anti korupsi, tolak gratifikasi, *whistleblowing system* pada akhir materi KIE serta stiker tolak gratifikasi apda setiap *slide* paparan.	Infokom
		Target jumlah desa yang diintervensi keamanan pangan tidak tercapai	Membuat rencana pelaksanaan GKPD	Infokom
		Target jumlah sekolah yang diintervensi keamanan pangan tidak tercapai	Membuat rencana pelaksanaan PJAS	Infokom
		Tingginya persentase pangan yang mengandung bahan berbahaya / TMS (tidak memenuhi syarat) pada tahap akhir	Membuat rancangan edukasi yang menarik	Infokom
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Tidak tercapainya jumlah UMKM yang didampingi dan memperoleh rekoemndasi IP CPPOB, kos, OBA	a. Melakukan Sosialisasi SOP kepada petugas terkait b. Aktif melakukan komunikasi baik secara langsung ataupun tidak langsung c. Monitoring berjenjang	Pemeriksaan (Sertifikasi)
		Program pendampingan UMKM tidak mendapatkan sambutan pelaku usaha	Menyampaikan link kepada setiap UMKM yang akan didampingi/sertifikasi	Pemeriksaan (Sertifikasi)
		Server yang digunakan dalam pelaksanaan pendampingan UMKM *down*	a. Membuat Manual/SOP penggunaan aplikasi b. Membuat link/bit.ly pemppek c. Melakukan Monev berjenjang	Pemeriksaan (Sertifikasi)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Waktu evaluasi dokumen oleh petugas serta pemeriksaan sarana setelah berkas lengkap melebihi *timeline* pada SOP	a. Sosialisasi SOP terkait Pemeriksaan Sarana Balai bagi Petugas terkait b. Monev berjenjang sesuai dengan ketentuan	Pemeriksaan (Sertifikasi)
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Ada tuntutan pra peradilan dari tersangka/pemilik barang bukti	a. Membuat SOP Penyidikan b. Rapat skenario operasi penindakan c. Koordinasi dengan korwas PPNS d. Gelar perkara	Penindakan
		Ancaman dan kekerasan terhadap petugas dari pelaku kejahatan di TKP	a. Investigasi mencakup informasi risiko ancaman dari pelaku b. Didampingi oleh polisi/TNI saat operasi penindakan	Penindakan
		Barang bukti hilang atau tidak sesuai dengan berita acara penyitaan	Monitoring pengelolaan barang bukti	Penindakan
		Kebocoran informasi sebelum proses operasi Penindakan	a. Penandatanganan Pakta Integritas b. Membatasi informasi yang diberikan hanya kepada pihak yang berwenang	Penindakan
		Ketidaksesuaian hasil investigasi dengan kondisi saat dilakukan penindakan	a. Investigasi terakhir sebelum operasi penindakan untuk memastikan tidak ada perubahan modus operandi. b. Menggunakan informan	Penindakan
		Operasi intelijen tidak berjalan sesuai rencana	a. Penunjukkan petugas penanggungjawab alat pendukung b. Melakukan pencatatan alat pendukung yang dimiliki	Penindakan
		Pengajuan tap geledah/ tap sita secara elektronik terhambat	Monitoring dan koordinasi pengajuan tap sita/tap geledah	Penindakan
		Petugas menerima gratifikasi untuk menghambat proses/ menghentikan penyidikan tanpa alasan yang sah	a. Membuat pakta integritas b. Sosialisasi integritas pada apel pagi c. Penghentian perkara harus melalui gelar perkara yang dihadiri penyidik, petugas dan Korwas PPNS	Penindakan
		Petunjuk JPU (P19) tidak lengkap/berulang	Konsultasi berkala dengan JPU	Penindakan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Senjata tidak termanfaatkan	a. Monitoring berkala perizinan senjata. b. Pemeliharaan senjata c. Pelatihan menembak	Penindakan
		Tersangka tidak memenuhi panggilan penyidik.	Membuat SOP penyidikan membuat rencana time line penanganan perkara	Penindakan
		Tidak diperolehnya data A1 untuk dilakukan penindakan	a. Peningkatan kompetensi petugas b. Pengadaan alat pendukung kegiatan investigasi	Penindakan
		Timeline penyelesaian berkas perkara tidak tercapai	Membuat *timeline* penanganan perkara dalam SOP penyidikan	Penindakan
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Analisa penjejakan digital tidak lengkap untuk dijadikan sebagai informasi intelijen	Mencari aplikasi *open source* untuk penjejakan digital mendesemenasikan kepada semua personil penjejakan digital	Penindakan
		Data analisis tidak bisa dipertanggungjawabkan	a. Penandatanganan Pakta Integritas b. Sumber data akurat dan terpecaya	Penindakan
		Data/informasi kerawanan kejahatan terlambat dilaporkan	Berkomunikasi dengan penanggungjawab aplikasi pusat dan melakukan pelaporan segera / seminggu sebelum *timeline* sehingga apabila ada kendala pada aplikasi dapat dikoordinasikan dengan penanggungjawab aplikasi dan/atau penghubung pusat.	Penindakan
		Laporan analisis tidak sesuai dengan kaidah kajian/ analisis ilmiah	a. Konsultasi dengan tenaga akademisi atau mencari pedoman penulisan kajian ilmiah b. Membuat perencanaan dengan *timeline* dan tema analisis paling lambat bulan Februari c. Monitoring setiap triwulan	Penindakan
		Tindaklanjut yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rekomendasi cegah tangkal kejahatan yang disampaikan	Monitoring berkala (setiap 6 bulan) rekomendasi yang diterima dan rencana tindak lanjut oleh fungsi terkait	Penindakan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
7	Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang yang prima	Masyarakat tidak puas terhadap layanan AMPERA (Amankan Produk Edukasi Masyarakat) yang diberikan	Penambahan link pada inovasi AMPERA (Amankan Produk Edukasi Masyarakat) yang terhubung dengan berbagai kanal media sosial BBPOM Palembang yaitu Whatsapp admin, instagram dan email	Infokom
		Masyarakat tidak puas terhadap layanan yang diberikan	Melakukan pembagian tugas pelayanan publik secara tidak langsung (tim media sosial)	a. Infokom b. Sertifikasi c. Tata Usaha
		Petugas menerima gratifikasi dari masyarakat/pelanggan yang mendapat pelayanan	Melakukan sosialisasi terkait gratifikasi kepada pegawai	a. Infokom b. Sertifikasi c. Tata Usaha
		Standar pelayanan belum mencakup seluruh layanan yang telah diberikan	Pembuatan Standar Pelayanan 2025 sesuai peraturan BPOM No 28 Tahun 2022	a. Infokom b. Sertifikasi c. Tata Usaha
		Tidak tercapainya target jumlah layanan publikasi	Melakukan sosialisasi terkait layanan MPP kepada masyarakat	a. Infokom b. Sertifikasi c. Tata Usaha
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Palembang yang optimal	Data dukung tidak sesuai pada masing-masing komponen penilaian maturitas manrisk	FGD/monev berkala pemenuhan komponen penilaian maturitas manrisk	Tim Manajemen Risiko
		Evaluasi TPI BPOM tidak sesuai dengan penilaian LKE mandiri	a. Meningkatkan kualitas monev kinerja internal dengan intensif membahas TL rekomendasi b. Monev kelengkapan data dukung	Tim RB
		Hasil Evaluasi SAKIP tidak sesuai /dibawah penilaian mandiri	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja melalui monev kinerja berkala.	Tim SAKIP
		Pelaksanaan program Detektif Abah (Dekatkan dan Temukan Jiwa Kreatif Bersama Agen Perubahan) tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dan minim partisipan	a. Membuat jadwal yang kegiatan yang telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai maksimal 1 minggu sebelum pelaksanaan b. Membuat usulan nota dinas kepada setiap ketua pokja untuk memberikan perwakilan pegawai untuk menghadiri c. Membuat agenda-agenda kreatif dengan	Tim Agen Perubahan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			sebelumnya mengumpulkan ide-ide dari pegawai	
		Pelaksanaan program HAI (Himpunan Aspirasi dan Inovasi) tidak memenuhi target yang telah ditetapkan	a. Selalu *branding* dan informasikan Program HAI saat apel atau kegiatan internal. b. Gunakan media internal: *standing banner*, *wallpaper* PC, email bulanan, grup WA, dan sebagainya. c. Membuat *tagline* mudah diingat d. Ide terbaik triwulanan dipublikasikan dan diberikan penghargaan (sertifikat, souvenir, *reward* sederhana). e. Aspirasi ditanggapi terbuka melalui "Laporan Tindak Lanjut HAI".	Tim Agen Perubahan
		Pelaksanaan program POMCast (Podcast BBPOM di Palembang) tidak memenuhi target yang telah ditetapkan	a. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tantangan, respons audiens, dan perbaikan konten. B. Membuat perencanaan konten yang baik agar program dapa terlaksana	Tim Agen Perubahan
		Pelaksanaan program TA-TA POM (TAnya-TAnya Badan POM) tidak memenuhi target yang telah ditetapkan	Memberikan konten dengan tampilan dan *caption* yang menarik agar menggugah keinginan masyarakat untuk berpartisipasi pada program TA-TA POM	Tim Agen Perubahan
		Program Agen Perubahan CERDIK (Cerita Ringan Yang Mendidik) tidak terlaksana sesuai timeline yang telah ditetapkan	Membuat alternatif konten (seperti upload konten dalam bentuk komik asli atau dalam bentuk video animasi)	Tim Agen Perubahan
		Program Agen Perubahan PANDU BPOM (Ucapan Edukatif dari BBPOM di Palembang) pada peringatan hari-hari besar di Indonesia tidak memenuhi target yang telah ditetapkan	Membuat *reminder* dan daftar hari-hari besar di Indonesia serta membuat infografis lebih menarik untuk di posting di media sosial	Tim Agen Perubahan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Program Agen Perubahan SITI PINTAR (Siraman Hati Perbaiki Mental Dasar) tidak terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan	Membuat *time table* dan melakukan sosialisasi berjenjang dan terjadwal sejak awal	Tim Agen Perubahan
		Realisasi anggaran tidak efisien	Monev intensif terhadap realisasi anggaran dan kegiatan	Tim Keuangan
		Realisasi RPD tidak sesuai rencana	Monev intensif terhadap RPD dan rencana kegiatan yang akan dilakukan perbulannya	Tim Keuangan
		Risk register tidak sesuai pedoman	bimtek/pelatihan manrisk kepada tim manrisk/ seluruh pegawai	Tim Manajemen Risiko
		Tidak tercapainya target *project plan* Ngopi Bareng Abah (Ngobrolin Inovasi Bareng Agen Perubahan) yang telah ditetapkan	Melakukan sosialisasi berupa materi infografis ke whatsapp grup sebelum pelaksanaan kuis Reformasi Birokrasi	Tim Agen Perubahan
		Penyusunan dan monitoring *risk register* tidak sesuai *timeline*	Membuat time table manrisk monev berkala terhadap risk register	Tim Manajemen Risiko

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional. Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin. Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawalan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai

produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas

sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat. Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 3.1.1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan menged
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di

atas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BBPOM di Palembang

Balai Besar POM di Palembang mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM, sebagai berikut :

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Dalam mendukung arah kebijakan BPOM tersebut, Balai Besar POM di Palembang perlu menetapkan strategi pelaksanaan yang lebih operasional, adaptif, dan sesuai dengan kondisi wilayah Sumatera Selatan. Strategi ini disusun dengan mempertimbangkan analisis lingkungan strategis (SWOT), kapasitas organisasi, dinamika industri farmasi dan pangan olahan, serta tantangan pengawasan yang semakin kompleks termasuk transformasi digital, perluasan pasar daring, dan peningkatan risiko KLB pangan. Dengan strategi yang terarah dan fokus, BBPOM di Palembang diharapkan mampu memperkuat efektivitas pengawasan, meningkatkan tata kelola layanan publik, memperluas kolaborasi lintas sektor, serta memastikan perlindungan konsumen secara optimal. Strategi untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut, antara lain :

1. **Penguatan Pengawasan Premarket dan Postmarket Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk Program MBG) Berbasis Risiko**

BBPOM di Palembang mengembangkan pendekatan pengawasan yang lebih terstruktur melalui penerapan manajemen risiko secara menyeluruh pada rantai premarket dan postmarket. Setiap jenis produk, sarana, dan rantai distribusi diprofilkan untuk menentukan prioritas pengawasan, sehingga sumber daya dapat diarahkan pada titik yang memiliki potensi bahaya tertinggi. Pengawasan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis juga diperkuat melalui standardisasi mekanisme sampling, peningkatan intensitas inspeksi, serta penyiapan *early warning system* untuk mendeteksi ketidaksesuaian secara cepat. Dengan pola ini, kegiatan pengawasan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi bergerak menjadi sistem yang mampu mengantisipasi risiko dan memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada masyarakat.

2. **Penguatan Sistem Cegah Tangkal dan Investigasi Siber pada Peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Terintegrasi**

Untuk menjawab dinamika peredaran produk ilegal yang semakin bergeser ke ranah digital, BBPOM di Palembang memperkuat sistem pengawasan siber melalui pemantauan daring yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Upaya ini termasuk peningkatan kemampuan identifikasi pola transaksi mencurigakan, penggunaan *digital intelligence*, serta kerja sama dengan platform *marketplace* untuk mempercepat proses penutupan akun atau toko yang menjual produk ilegal. Selain itu, koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait juga ditingkatkan guna memastikan proses penindakan berjalan efektif. Dengan sistem ini, fungsi cegah tangkal tidak hanya mengandalkan patroli konvensional, tetapi bertransformasi menjadi operasi siber yang proaktif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

3. **Peningkatan Daya Saing dan Kepatuhan Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Pendampingan Terarah**

BBPOM di Palembang memprioritaskan pendampingan pelaku usaha, terutama UMKM, melalui pendekatan yang lebih sistematis dan mudah diakses. Melalui PEMPPEK dan berbagai upaya pendampingan, pelaku usaha dibantu memahami standar keamanan dan mutu produk, proses perizinan, serta penerapan cara produksi yang baik. Pendampingan dilakukan secara terjadwal dan mengikuti tahapan yang jelas, mulai dari asesmen awal, penyusunan rekomendasi perbaikan, hingga verifikasi implementasi. Strategi ini tidak hanya bertujuan membantu pelaku usaha memenuhi ketentuan, tetapi juga menciptakan produk yang lebih kompetitif dan aman untuk masyarakat. Dengan demikian, pembinaan menjadi bukan sekadar kegiatan sosialisasi, melainkan sebuah proses peningkatan kapasitas yang

berkelanjutan.

4. **Penguatan Literasi Publik dan Peran Masyarakat dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

Peningkatan literasi masyarakat ditempuh melalui strategi komunikasi yang lebih tersegmentasi dan berbasis kebutuhan kelompok sasaran. BBPOM di Palembang memperluas metode edukasi dengan mengombinasikan kampanye langsung, edukasi komunitas, serta pemanfaatan media digital untuk memperluas jangkauan informasi. Selain menyampaikan pesan keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan, dilakukan pula pemberdayaan komunitas seperti sekolah, kelompok masyarakat, dan jejaring relawan untuk mengenali produk berisiko serta melaporkannya melalui kanal pengaduan resmi. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mitra aktif dalam menjaga keamanan produk yang beredar di lingkungan mereka.

5. **Penguatan Kemitraan Strategis dengan Lintas Sektor Lokal, Nasional, dan Akademisi di bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

Untuk mengatasi kompleksitas isu keamanan obat dan makanan, BBPOM di Palembang membangun kemitraan yang lebih terarah dan bersifat strategis dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, lembaga penegak hukum, asosiasi industri, serta universitas. Melalui forum koordinasi, penyusunan rencana aksi bersama, serta penandatanganan komitmen formal, kerja sama ini dikembangkan agar menghasilkan langkah kolaboratif yang konkret, mulai dari pengawasan rutin, pendampingan industri, hingga pertukaran data yang relevan. Dengan kemitraan ini, efektivitas pengawasan semakin meningkat karena setiap pihak berkontribusi sesuai perannya dalam ekosistem kesehatan masyarakat.

6. **Modernisasi Kapasitas Teknis untuk Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

Penguatan kapasitas teknis BBPOM di Palembang perlu diarahkan pada modernisasi laboratorium, pemanfaatan data yang lebih terintegrasi, serta peningkatan kompetensi SDM. Transformasi ini memastikan proses pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan berjalan lebih cepat, akurat, dan responsif terhadap risiko. Melalui penguatan fasilitas uji, peningkatan kemampuan analis dan penyidik, serta optimalisasi teknologi informasi, BBPOM di Palembang dapat mendukung keputusan pengawasan yang berbasis bukti dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara konsisten.

7. Reformasi Tata Kelola dan Transformasi Layanan Publik Berbasis Elektronik

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, BBPOM di Palembang memperkuat implementasi Reformasi Birokrasi melalui penyederhanaan proses layanan, digitalisasi prosedur, serta peningkatan transparansi layanan perizinan dan pengaduan. Sistem layanan berbasis elektronik dikembangkan agar masyarakat dapat mengakses informasi, melakukan transaksi layanan, dan memantau proses secara lebih cepat dan mudah. Selain itu, penguatan Zona Integritas turut mendorong terciptanya budaya kerja yang lebih akuntabel dan bebas dari praktik maladministrasi. Seluruh upaya ini diarahkan untuk menciptakan pelayanan publik yang responsif, efisien, serta memberikan pengalaman layanan yang lebih baik bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Tabel 3.2.1. Matriks Arah Kebijakan BPOM dan Strategi BBPOM di Palembang 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN BPOM	STRATEGI BBPOM di Palembang
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan Pengawasan Premarket dan Postmarket Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk Program MBG) Berbasis Risiko
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Penguatan Sistem Cegah Tangkal dan Investigasi Siber pada Peredarqan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Terintegrasi
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Peningkatan Daya Saing dan Kepatuhan Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Pendampingan Terarah
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan Literasi Publik dan Peran Masyarakat dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan Kemitraan Strategis dengan Lintas Sektor Lokal, Nasional, dan Akademisi di bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Modernisasi Kapasitas Teknis untuk Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Reformasi Tata Kelola dan Transformasi Layanan Publik Berbasis Elektronik

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Balai Besar POM di Palembang juga dilaksanakan

secara responsif gender dan inklusi sosial.
Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, Balai Besar POM di Palembang melaksanakan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia; dan pengelolaan sarana dan prasarana BPOM.

3.2.1.Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Palembang mencakup pengawasan *pre* dan *post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, BBPOM di Palembang tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

1. Pemeriksaan Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Pengawasan sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara rutin dilakukan untuk memantau pemenuhan persyaratan terhadap standar yang ditentukan. Peningkatan kualitas sarana produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dilakukan melalui kegiatan strategis berikut:

a. Meningkatkan komitmen pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi terhadap Renlak yang telah disusun berdasarkan Kajian Analisis Risiko;
b. Meningkatkan komitmen pelaksanaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) serta mendukung optimalisasi fungsi SIPT modul pemeriksaan sarana produksi dalam menunjang sistem pelaporan yang efektif dan efisien untuk pemutahiran database sarana produksi, *track record* sarana produksi, analisis data serta tindaklanjut dalam kerangka pengawasan;
c. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan sarana produksi;
d. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi serta tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi.

2. Pemeriksaan Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Kepatuhan sarana distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam penerapan regulasi atau standar dalam rantai distribusi berperan penting dalam penjaminan khasiat, mutu dan keamanan produk sebelum dikonsumsi oleh konsumen. Peningkatan kualitas sarana distribusi dilakukan melalui kegiatan strategis berikut:

a. Meningkatkan komitmen pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi terhadap Renlak yang telah disusun berdasarkan Kajian Analisis Risiko;
b. Meningkatkan komitmen pelaksanaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) serta mendukung optimalisasi fungsi SIPT modul pemeriksaan sarana distribusi dalam menunjang sistem pelaporan yang efektif dan efisien untuk pemutahiran database sarana distribusi, *track record* sarana distribusi, analisis data serta tindaklanjut dalam kerangka pengawasan;
c. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentinga dalam rangka tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan sarana distribusi;
d. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi serta tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi

3. Sertifikasi Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Penjaminan kepatuhan sarana produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam penerapan regulasi atau standar dalam melakukan kegiatan produksi dibuktikan dengan dikeluarkannya Sertifikasi Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (Sertifikast CPOB, CPKB CPOTB dan CPPOTB). Beberapa Langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mendukung keberhasilan sertifikasi sarana produksi adalah sebagai berikut:

a. Mempersiapkan *base line* data sarana produksi yang berada di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Palembang lengkap dengan status sertifikasi produksinya;
b. Berkomunikasi intensif dengan sarana produksi, terutama saat inspeksi rutin mengenai pentingnya program Sertifikasi sarana produksi;
c. Memfasilitasi sarana produksi terhadap kebutuhan desk CAPA sebagai dukungan untuk penyelesaian CAPA sertifikasi;
d. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi sarana produksi termasuk koordinasi dengan BPOM.

4. Sertifikasi Sarana Distribusi Obat

Seperti halnya Sarana Produksi, penjaminan kepatuhan sarana produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam penerapan regulasi atau standar dalam melakukan kegiatan distribusi, dibuktikan dengan dikeluarkannya

Sertifikasi Distribusi Obat yang saat ini masih diterapkan kepada sarana PBF. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mendukung keberhasilan sertifikasi sarana distribusi antara lain:

a. Mempersiapkan base line data sarana distribusi yang berada di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Palembang lengkap dengan status sertifikasi distribusinya;
b. Berkomunikasi intensif dengan sarana distribusi, terutama saat inspeksi rutin mengenai pentingnya program Sertifikasi sarana distribusi;
c. Memfasilitasi sarana distribusi terhadap kebutuhan desk CAPA sebagai dukungan untuk penyelesaian CAPA sertifikasi; dan
d. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi sarana
e. produksi termasuk koordinasi dengan BPOM.

5. Komunikasi, Informasi, Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dikatakan efektif jika pemahaman masyarakat tentang kualitas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar bertambah. Masyarakat semakin cerdas dalam memilih produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang akan dikonsumsinya. Langkah strategis untuk mendukung keberhasilan KIE diantaranya;

a. KIE tentang sediaan farmasi dan pangan olahan aman dan bermutu yang jangkauannya luas sehingga setiap individu di seluruh wilayah Sumatera Selatan dapat terpapar;
b. Bimbingan teknis dan pendampingan untuk pelaku usaha terkait perizinan lebih sering dilakukan;
c. Sosialisasi regulasi kepada pelaku usaha lebih sering dilakukan;
d. Menggunakan media komunikasi yang efektif kepada pelaku usaha dan Masyarakat

6. Pemeriksaan Produk dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Laboratorium sebagai tulang punggung pengawasan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan memenuhi syarat atau tidak. Untuk itu, kualitas sampling dan pengujian sangat mempengaruhi sasaran kegiatan ini. Beberapa hal dilakukan dalam rangka menunjang kegiatan sampling dan pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan antara lain:

a. Memperkuat komitmen pelaksanaan sampling dan pengujian berdasarkan Pedoman Sampling agar mencapai target yang telah ditetapkan serta mendorong tindaklanjut hasil pengujian;
b. Metode sampling dilaksanakan melalui gabungan antara metode *purposive targeted* dengan pendekatan analisis risiko;

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana laboratorium Balai Besar POM di Palembang sesuai persyaratan *Good Laboratorium Practices* (GLP) dan Standar Minimum Peralatan Laboratorium Unit Pelaksan Teknis di Lingkungan BPOM;
d. Meningkatkan standar ruang lingkup akreditasi laboratorium serta Jaminan Mutu Hasil Pengujian (JMHP) terhadap seluruh sampel yang diuji;
e. Meningkatkan komitmen pelaksanaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) serta mendukung optimalisasi fungsi SIPT modul sampling dan pengujian dalam menunjang sistem pelaporan yang efektif dan efisien untu analisis data dan tindaklanjut dalam kerangka pengawasan;
f. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian serta tindaklanjut hasil pengujian

7. Penindakan Tindak Pidana Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Penindakan tindak pidana Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dilakukan melalui kegiatan berikut:

a. Operasi dan Penyidikan di Provinsi Sumatera Selatan

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi diikuti oleh kurangnya kapasitas dan kapabilitas pengawasan disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan mencari celah untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal dilakukan secara terorganisir oleh sindikat yang beroperasi secara internasional sehingga sulit diberantas menggunakan metode metode konvensional. Untuk mengatasi kejahatan kemanusiaan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan dilakukan solusi holistik pada seluruh rantai *demand* dan *supply* sediaan farmasi dan pangan olahan dengan pendekatan preventif maupun represif. Selain memerlukan dukungan regulasi yang memberikan efek jera pada para pelaku kejahata di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM juga memerlukan penguatan secara struktur dan kewenangan diikuti dengan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang memadai.

b. Penindakan dan Kasus Tindak Pidana Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan tugas utama BBPOM di Palembang dengan tujuan untuk melindungi Kesehatan masyarakat dari risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu. Kemajuan

teknologi telah membawa perubahan yang cepat dan signifikan terhadap komoditi yang menjadi objek pengawasan BBPOM di Palembang. Fenomena beredarnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu di masyarakat tidak bis dipungkiri. Trend temuan pelanggaran produksi dan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan illegal menunjukkan jumlahnya secara terus menerus meningkat yang diiringi dengan peningkatan modus operandi yang semakin canggih. BBPOM di Palembang menyadari bahwa penegakan hukum di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan akan mencapai hasil yang optimal jika ada kerjasama yang baik di antara sektor terkait dalam rangkaian "*Integrated Criminal Justice System* (ICJS)" sesuai koridor kewenangan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing- masing.

c. Peningkatan Kerjasama CJS

Penegakan hukum di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan dalam arti luas tidak terlepas dari skema CJS. Peran fungsi Penindakan dalam realitasnya mempunyai posisi yang strategis karena berkaitan langsung dengan penegakan hukum di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Dalam hal ini fungsi Penindakan menjadi lini terdepan dalam upaya menjalin kerjasama yang baik di antara sektor terkait dalam rangkaian ICJS.

8. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

BBPOM di Palembang tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mendukung sasaran strategis BPOM.

Langkah strategis untuk meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Palembang diantaranya:

a. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM aparatur Balai Besar POM di Palembang melalui pendidikan dan pelatihan yang berdasarkan standar kompetensi jabatan atau kebutuhan organisasi dan berdampak dalam pengembangan karir selanjutnya;
b. Mendorong pemenuhan SDM berdasarkan Analisis Beban Kerja dan kebutuhan organisasi sesuai dengan kapasitas tugas dan fungsi kelembagaan BBPOM di Palembang;
c. Mengoptimalkan pengelolaan SDM aparatur BBPOM di Palembang meliputi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), penegakan disiplin, promosi dan mutasi, penghargaan, penggajian dan tunjangan serta internalisasi budaya kerja;
d. Mendorong pemenuhan kebutuhan anggaran BBPOM di Palembang serta meningkatkan pengelolaan anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Sumatera Selatan;

e. Meningkatkan komitmen penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan organisasi pembelajar (*Learning Organization*) dalam rangka Reformasi Birokrasi;
f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
g. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, penatausahaan Barang Milik Negara, kearsipan, dan kualitas proses pengadaan Barang dan Jasa

3.2.2. Kegiatan Pengeloaan Sarana dan Prasarana BPOM

Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan BMN, belanja pegawai (gaji) serta pemeliharaan rutin dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan BBPOM di Palembang.

1. Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan

Penguatan internal dan eksternal BBPOM di Palembang menjadi kebutuhan dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal. Oleh karena itu, pelaksanaan program dan kegiatan strategis pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk media. Dukungan pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk media terhadap BBPOM di Palembang akan tumbuh jika kehadirannya dirasakan memberikan manfaat. Untuk itu, segala upaya BBPOM di Palembang memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu sediaan farmasi dan pangan olahan harus selalu diinformasikan kepada publik.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM

Kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan BBPOM di Palembang dalam mencapai visi dan misinya. Menimbang visi dan misi BPOM serta tuntutan yang tinggi dari berbagai pemangku kepentingan atas kinerja BPOM, pengelolaan SDM pada difokuskan pada 1) Implementasi sistem merit secara konsisten; 2) Implementasi manajemen talenta dalam pembinaan karier secara konsisten; 3) Pengembangan dan implementasi strategi pembelajaran terintegrasi.; dan 4) Peningkatan ASN BPOM yang memiliki kompetensi digital.

Selain itu manajemen SDM aparatur dilakukan berdasarkan pada sistem merit yaitu kebijakan dan pengelolaan SDM yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara wajar dan adil dengan tanpa diskriminatif.

Selain SDM, Sarana dan prasarana juga merupakan faktor penunjang yang vital dalam pelaksanaan program kerja. Pengelolaan sarana dan prasarana harus dilakukan secara akuntabel mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan sarana prasarana, hingga pemeliharaan.

3. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan

Teknologi Informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung kinerja BBPOM di Palembang untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses bisnisnya. Pengelolaan teknologi informasi komunikasi, data dan informasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan upaya untuk memformalkan pengelolaan, perbaikan, akuntabilitas dan kewenangan mengambil keputusan dalam skala yang lebih luas pada area strategi TI dengan mengoptimalkan sumber daya TI (infrastruktur maupun sistem informasi) yang tersedia.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dan mendukung tercapainya sasaran strategis BPOM, BBPOM di Palembang menyusun matriks kerangka kinerja periode 2025-2029 yang akan menjadi sasaran akhir kinerja BBPOM di Palembang dalam memperkuat pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan khususnya di wilayah kerja BBPOM di Palembang. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih selama periode lima tahun.

Tabel 4.1 Matriks Kinerja BBPOM di Palembang 2025-2029

No	Indikator Kinerja BBPOM di Palembang	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase	90,00	91,00	92,00	93,25	94,50
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Persentase	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase	77,00	87,00	89,00	92,00	95,00
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Persentase	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase	90,50	92,25	93,50	95,00	95,00
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase	90,00	93,00	95,00	97,00	100,00
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase	94,75	95,75	96,75	98,00	99,00
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Persentase	94,00	95,00	96,00	97,00	98,40
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Persentase	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00
13	Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai Besar POM di Palembang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai	69,70	75,20	77,10	81,00	82,90

15	Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Persentase	18,18	36,36	54,55	72,73	100,00
16	Persentase Sampel Pangan MBG yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Persentase	-	81,00	82,00	83,00	84,00
17	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase	61,00	67,00	78,00	78,00	83,00
18	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Palembang	Persentase	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00
19	Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	Persentase	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Persentase	13,79	30,25	47,69	67,99	89,30
21	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Nilai	89,09	89,98	90,87	91,76	92,65
22	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Nilai	12	15	18	20	22
23	Jumlah desa pangan aman	Nilai	4	7	7	7	7
24	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Nilai	1	2	2	2	3
25	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang	Nilai	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90
26	Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Palembang	Nilai	85,90	87,10	88,32	89,56	90,81
27	Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang	Nilai	81,04	81,55	82,06	82,57	83,08
28	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang	Nilai	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
29	Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Palembang	Nilai	3,00	3,20	3,40	3,50	3,60

4.2. Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan tugas pengawasan oleh Balai Besar POM di Palembang menuntut dukungan pendanaan yang stabil dan berkelanjutan. Anggaran tidak hanya diperlukan untuk mendukung aktivitas pengawasan rutin, tetapi juga untuk pengembangan kapasitas laboratorium, pemutakhiran teknologi informasi, peningkatan kompetensi SDM, serta penguatan sarana prasarana dalam menghadapi tantangan distribusi produk dan dinamika risiko yang terus berkembang. Oleh karena itu, kebutuhan pendanaan jangka menengah dirumuskan secara komprehensif untuk memastikan setiap program dapat berjalan optimal. Rincian kerangka pendanaan berdasarkan kegiatan dan sumber dana selama tahun 2025–2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2.1 Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Palembang Tahun 2025-2029 Berdasarkan Kegiatan

Program/Kegiatan	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	17.640,81	8.270,45	21.345,39	23.479,93	25.827,92
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	12.293,90	12.310,11	14.875,62	16.363,19	17.999,50
TOTAL	**29.934,72**	**20.580,56**	**36.221,01**	**39.843,12**	**43.827,43**

Tabel 4.2.2 Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Palembang Tahun 2025-2029 Berdasarkan Sumber Pendanaan

Sumber Dana	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	28.273,62	18.919,46	34.559,91	38.182,02	42.166,33
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1.661,10	1.661,10	1.661,10	1.661,10	1.661,10
TOTAL	**29.934,72**	**20.580,56**	**36.221,01**	**39.843,12**	**43.827,43**

BAB V
PENUTUP

Renstra BBPOM di Palembang 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang selaras dengan amanah Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Renstra BBPOM di Palembang 2025-2029 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi menjadi pedoman dalam perencanaan menengah dan tahunan. Untuk memastikan Renstra yang disusun dapat berjalan sesua dengan rencana yang ditetapkan maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi Renstra BBPOM di Palembang secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Renstra BBPOM di Palembang Tahun 2025-2029 harus dijadika acuan kerja di lingkungan Balai Besar POM di Palembang sesuai denga tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua fungs dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientas pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR POM DI PALEMBANG TAHUN 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang									29.934,73	20.580,56	36.221,02	39.843,12	43.827,43	UPT BPOM
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia									17.640,81	8.270,45	21.345,39	23.479,93	25.827,92	UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT													UPT BPOM
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Palembang	90,00	91,00	92,00	93,25	94,50						UPT BPOM
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	BBPOM di Palembang	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00						UPT BPOM
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Palembang	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00						UPT BPOM
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	BBPOM di Palembang	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						UPT BPOM
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Palembang	77,00	87,00	89,00	92,00	95,00						UPT BPOM
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	BBPOM di Palembang	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00						UPT BPOM
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Palembang	90,50	92,25	93,50	95,00	95,00						UPT BPOM
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Palembang	90,00	93,00	95,00	97,00	100,00						UPT BPOM
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Palembang	94,75	95,75	96,75	98,00	99,00						UPT BPOM
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Palembang	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	BBPOM di Palembang	94,00	95,00	96,00	97,00	98,40						UPT BPOM
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	BBPOM di Palembang	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00						UPT BPOM
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	BBPOM di Palembang	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						UPT BPOM
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	BBPOM di Palembang	69,70	75,20	77,10	81,00	82,90						UPT BPOM
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	BBPOM di Palembang	18,18	36,36	54,55	72,73	100,00						UPT BPOM
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Palembang	-	81,00	82,00	83,00	84,00						UPT BPOM
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans		BBPOM di Palembang	45	50	50	60	60	46,45	10,00	56,20	61,82	68,01	UPT BPOM
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		BBPOM di Palembang	445	467	490	514	539	366,14	414,24	443,03	487,33	536,06	UPT BPOM
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		BBPOM di Palembang	1.027	1.036	1.089	1.145	1.206	658,61	664,39	796,92	876,61	964,28	UPT BPOM
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		BBPOM di Palembang	76	88	96	104	113	45,61	52,81	55,19	60,71	66,78	UPT BPOM
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		BBPOM di Palembang	567	619	657	701	749	356,51	389,21	431,38	474,52	521,97	UPT BPOM
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		BBPOM di Palembang	204	204	204	216	216		24,1				UPT BPOM
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		BBPOM di Palembang	1		1	1	1	1.000,00		1.210,00	1.331,00	1.464,10	UPT BPOM
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		BBPOM di Palembang	1	1	1	1	1	2298,33	2278,33	2780,98	3059,07	3364,98	UPT BPOM
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		BBPOM di Palembang	1	1	1	1	1	3785,38	1.429,63	4580,31	5038,35	5542,18	UPT BPOM
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar		BBPOM di Palembang	0	794	794	794	794						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	BBPOM di Palembang											UPT BPOM
	1 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Palembang	61,00	67,00	78,00	78,00	83,00						UPT BPOM
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	BBPOM di Palembang	11	12	14	14	15	14,46	15,10	17,50	19,25	21,17	UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas KIE	BBPOM di Palembang											UPT BPOM
	1 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	BBPOM di Palembang	89,09	89,98	90,87	91,76	92,65						UPT BPOM
	2 Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	BBPOM di Palembang	12	15	18	20	22						UPT BPOM
	3 Jumlah desa pangan aman	BBPOM di Palembang	4	7	7	7	7						UPT BPOM
	4 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	BBPOM di Palembang	1	2	2	2	3						UPT BPOM
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	BBPOM di Palembang	19928	20300	20400	20520	20664	6085,40	2057,55	7363,34	8099,67	8909,64	UPT BPOM, Dit. PMPU OTSKK, & Dit. PMPU Pangan Olahan
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	BBPOM di Palembang	17	5	7	8	9	74,66	13,16	90,34	99,37	109,31	UPT BPOM
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	BBPOM di Palembang	12	15	18	20	22	600,24	107,88	726,29	798,92	878,81	UPT BPOM
	RO 4: Desa Pangan Aman	BBPOM di Palembang	4	7	7	7	7	639,45	103,65	773,73	851,10	936,21	UPT BPOM
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	BBPOM di Palembang	1	2	2	2	3	148,36	75,05	179,51	197,46	217,21	UPT BPOM
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	BBPOM di Palembang											UPT BPOM
	1 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	BBPOM di Palembang	13,79	30,25	47,69	67,99	89,3						UPT BPOM
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	BBPOM di Palembang	17	20	21	24	25	63,82	28,16	77,23	84,95	93,44	UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	BBPOM di Palembang											UPT BPOM
	1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	BBPOM di Palembang	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00						UPT BPOM
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	BBPOM di Palembang	3	4	4	5	5	350,55	467,40	424,16	466,58	513,24	UPT BPOM
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	BBPOM di Palembang											UPT BPOM
	1 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	BBPOM di Palembang	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00						UPT BPOM
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	BBPOM di Palembang	14	14	15	15	15	173,19	23,27	209,56	230,52	253,57	UPT BPOM
	Layanan Publik UPT yang prima	BBPOM di Palembang											UPT BPOM
	1 Indeks Pelayanan Publik UPT	BBPOM di Palembang	4,7	4,75	4,80	4,85	4,90						UPT BPOM
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	BBPOM di Palembang	255	249	252	263	271	159,65	34,79	193,18	212,50	233,75	UPT BPOM
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	BBPOM di Palembang											UPT BPOM
	1 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	BBPOM di Palembang	85,90	87,10	88,32	89,56	90,81						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	2 Nilai AKIP UPT BPOM	BBPOM di Palembang	81,04	81,55	82,06	82,57	83,08						UPT BPOM
	3 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	BBPOM di Palembang	5	5	5	5	5						UPT BPOM
	4 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	BBPOM di Palembang	3	3,20	3,40	3,50	3,60						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	BBPOM di Palembang	1	1	1	1	1	574,00	81,74	694,54	763,99	840,39	UPT BPOM dan Deputi 1,2,3,4
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	BBPOM di Palembang	1		1	1	1	100,00		121,00	133,10	146,41	UPT BPOM
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi	BBPOM di Palembang	1		1	1	1	100,00		121,00	133,10	146,41	UPT BPOM
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM								12.293,90	12.310,11	14.875,62	16.363,19	17.999,50	UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	BBPOM di Palembang	1	1	1	1	1	8,00	5,00	9,68	10,65	11,71	UPT BPOM
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	BBPOM di Palembang	1	1	1	1	1	12285,91	12305,11	1486,59	16352,54	17987,80	UPT BPOM


kata
BPOM